

**REFORMULASI NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI
DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA**

(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

JURNAL

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
2. Rachmi Sulistyarini, SH., MH



Oleh:
MUHAMMAD BUSYROL FUAD
NIM 135010112111009/10210030

**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
ANTARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2015**

REFORMULASI NORMA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

(Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Muhammad Busyrol Fuad

*Program Double Degree Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*

e-mail: voead4999@gmail.com

Abstract

Fulfillment of the Rights and Duties of husband and wife is an important factor for the creation of a family who *sakīnah, mawaddah, wa rahmah*. In creating an ideal relationship of husband and wife, both of them must have a role and equal opportunity in the public domain or domestic. This is not reflected in the Law No. 1 of 1974 About Marriage, for example, the husband bears responsibility as breadwinner and protector for his wife. Instead wife are given responsibilities as housewives to manage domestic. The research aims to determine the norms of the rights and duties of husband and wife in Act No. 1 of 1974 About Marriage are gender refraction. This type of research used in this research is normative, using the approach of legislation and historical approaches. Based on the analysis of the data that has been collected, it is concluded that some of the provisions concerning the rights and duties of husband and wife in the Law of Marriage Act is gender refraction. Among them, the husband is the head of the household and the wife is a housewife (Article 31, paragraph 3), the husband is obliged to provide for his wife and protect the family in accordance with his ability (34, paragraph 1), while the wife is the household as much as you (article 34 paragraph 2). According to the authors conclusion, that Article 31, paragraph 3 shall be deleted because it is gender refraction, and the existence of another article which is a translation of this article deserves to be renewed.

Kata Kunci : Gender Mainstreaming, Rights and Duties of Husband and Wife, Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Semenjak disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto dan dicatatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan genap berusia 40 tahun di akhir 2014. Usia yang cukup tua untuk sebuah Peraturan perundang-

undangan. Namun, dalam kerentanan usia undang-undang ini, agaknya perlu mendapatkan suatu perhatian khusus, yakni berkaitan dengan relevansinya terhadap kehidupan sekarang. Hal ini mengingat, secara historis undang-undang perkawinan disusun pada kondisi masyarakat yang masih sangat kental dengan tradisi patriarkhi dan tidak terlalu sensitif gender, terlebih pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34.

Jumlah para legislator yang mendominasi penyusunan undang-undang ini turut menjadi faktor penting dalam mempengaruhi karakteristiknya. Bahwa para legislator yang mendominasi pembuatan undang-undang ini adalah laki-laki, sehingga tidak heran ketika produk hukum¹ yang dihasilkan cenderung patriarkhis atau mensubordinasikan posisi perempuan.

Melihat perkembangan masyarakat yang pesat, dari sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hingga sekarang, muncul berbagai kasus baru yang sulit dipecahkan hakim Pengadilan Agama.² Hal itu disebabkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat beberapa pasal³ yang sudah tidak relevan untuk menangani berbagai permasalahan baru yang terus bermunculan mengikuti dinamika masyarakat, diantaranya persoalan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering terjadinya kawin kontrak, dan berbagai persoalan lain yang melahirkan diskriminasi bagi perempuan dalam sebuah perkawinan.

Sejumlah pasal dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan dianggap berseberangan dengan undang-undang lain, seperti UUD NRI 1945, UU No. 7 Tahun 1986 tentang ratifikasi CEDAW; dan UU No. 39

¹ Menurut Mahfudz MD, bahwa menggelar diskursus hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial politik (negara) di mana hukum itu diciptakan, atau konteks politik hukumnya. Untuk itu karakter suatu produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya; artinya, konfigurasi politik tertentu dari suatu kelompok dominan (penguasa) selalu melahirkan karakter produk hukum tertentu sesuai dengan visi politiknya. Dalam Mahfudz MD, **Politik Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm 675.

² Beberapa kasus tersebut diantaranya, kasus yang menjerat salah seorang selebriti Tanah Air Maya Ahmad Dani yang berujung pada perceraian. Dalam kasus yang terjadi Maya dikatakan sebagai isteri yang tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Hal tersebut karena maya lebih sibuk dengan aktivitasnya sebagai selebriti papan atas. Sehingga Dani selaku suami merasa di langkahi sebagai kepala keluarga yang menurut Undang-undang lebih dominan mempunyai kewajiban untuk mencari rezeki dalam menafkahi keluarga. Dan pada intinya, Maya diharapkan hanya untuk menjadi seorang istri yang paham peran dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, menjaga rumah, dan melayani suami, kira kira seperti itulah tugasnya. Lihat Arjuwin Taqwa, **Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Gender (Studi Kritis undang-undang Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2009, hlm 2.

³ Beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tidak lagi relevan adalah pasal 2, 3, 4, 5, 7, 11, 31, 34, dan 43. YLBH APIK Jakarta, **Usulan Amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berikut Argumentasi-argumentasinya**. (Diakses pada hari Kamis, 26 Februari 2015).

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Semua regulasi tersebut sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan hak-hak perempuan menuju terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.⁴ Dengan berbagai permasalahan pelik tersebut, menyebabkan esensi perkawinan yang merupakan sebuah pelembagaan sakral dalam rangka mewujudkan suasana kekeluargaan yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah* menjadi ternodai.

Pada dasarnya perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.⁵

Dalam perumusannya, undang-undang ini banyak didasarkan atas pandangan ulâma' klasik yang cara pandanganya bercorak patriarkhis, salah satunya Ibnu Hazm yang berpendapat bahwasanya memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban sejak terjalinnya akad nikah yang disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.⁶ Pandangan ini memiliki sebuah pemahaman bahwa mencari nafkah adalah otoritas penuh seorang suami, sehingga seorang istri tidak berpeluang untuk turut serta membantu suami dalam mencari nafkah, walaupun dengan kondisi perekonomian yang serba kekurangan. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Akmalia Uqtuv berjudul "Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syeikh Muhammad 'Ali As Shâbûni dalam Kitab *Az Zawâj Al Islâmi Al Mubakkir: Sa'adah Wa Hasânah*). Relasi suami istri menurut Muhammad 'Ali As Shâbûni lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak.⁷ Padahal istripun berhak menikmati hubungan seksual, mendapati suaminya berhias/berdandan untuknya, menggunakan hak publiknya, hanya untuk belajar pengetahuan/mengamalkan ilmunya, dan haknya untuk bekerja di luar apabila ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, selama norma-norma

⁴ Siti Musdah Mulia, **Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender**, Kibar Press, Yogyakarta, 2006, hlm 166.

⁵ Ahmad Rofiq, **Hukum Islam Di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 181.

⁶ As Sayyid Sâbiq, **Fiqh as Sunnah**, Fath al I'lam al Arâbi, al Qâhirah, 1410 H/1990 M, hlm 278.

⁷ Akmalia Uqtuv, **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syeikh Muhammad 'Ali As Sâbûni Dalam Kitâb Az Zawâj Al Islâmi Al Mubakkir: Sa'adah Wa Hasânah)**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

agama dan susila tetap terpelihara, sedangkan mendidik anak merupakan suatu kewajiban bersama.

Pandangan ulâma' diatas dirasakan dengan adanya Undang-undang yang sengaja dibuat oleh pemegang tumpuk kekuasaan sehingga menimbulkan norma yang bercirikan norma penguasa, padahal seharusnya peraturan perundang-undangan itu mampu memberi jaminan keadilan yang sama antara laki-laki dan perempuan.⁸

Seiring dengan pesatnya kemajuan pola pikir dan berbagai perubahan menyangkut hubungan laki-laki (suami) dan perempuan (istri), di mana dalam memahami perbedaan tersebut tidak semata-mata hanya dimaknai sebagai kodrat, tetapi juga gender,⁹ maka aturan-aturan yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan patut untuk dikaji lebih dalam, karena masih dianggap bias gender¹⁰.

Salah satu bentuk ketimpangan tersebut adalah berkaitan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri yang tertuang dalam bab VI Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan. Dalam beberapa pasal tersebut, terdapat pasal yang mensubordinasikan posisi perempuan, yakni Pasal 31 Ayat (3) yang memposisikan suami sebagai seorang kepala rumah tangga, sedangkan seorang istri hanyalah bertugas menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga yang dalam bahasa jawaanya akrab dengan istilah *macak, masak dan manak* (3M).

Tidak berbeda dengan apa yang termaktub dalam Pasal 34 mulai dari ayat (1), (2) dan (3). Ayat pertama dalam pasal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ibnu Hazm, bahwa seorang suami wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan memenuhi berbagai keperluan rumah tangga sesuai dengan

⁸ Atun Wardatun, **Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat**, hlm. 1

⁹ Siti Rukhaini Dzhayatin, dkk. **Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki di Dalam Reformulasi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm vii.

¹⁰ Dalam bukunya, Mansour menyatakan untuk memahami gender harus ada perbedaan antara makna gender dan seks itu sendiri. Gender dalam pengertiannya sebuah konsep perbedaan antara sifat laki-laki dan perempuan yang berdasarkan atas konstruksi sosial maupun kultural. Oleh karena itu, dengan adanya konstruksi sosial maupun cultural, gender tidak bersifat permanen dan bisa saja berubah-ubah seiring dari waktu-kewaktu. Sedangkan seks adalah perbedaan secara biologis antara laki-laki dan perempuan, seperti; laki-laki memproduksi sperma dan perempuan mempunyai rahim dan melahirkan anak. Artinya sifat-sifat secara biologis tersebut tidak bisa dipertukar antara laki-laki dan perempuan karena sudah merupakan ketentuan Tuhan. Lihat; Mansour Fakihi, **Analisis Gender & Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm 8. Kesamaan kondisi serta kesamaan status untuk mendapatkan peluang yang sama atas hak-hak selaku manusia guna terlibat langsung dalam kegiatan sosial budaya, politik, ekonomi serta pendidikan dan keamanan dan kesempatan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Oleh karenanya kesetaraan gender dapat dikatakan sebagai wujud penilaian, penghargaan yang sama dari masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan kaum laki-laki dan perempuan diberbagai aspek atas peran mereka. Lihat: Khalifah Indar Parawansa, **Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Kesenjangan Gender**, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm IX.

kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan dalam ayat keduanya menegaskan bahwasannya yang berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga hanyalah istri, sedangkan suami tidak. Ayat terakhir adalah sebagai sebuah upaya dalam rangka melakukan penyelesaian masalah ketika terdapat konflik antara suami dan istri yang lalai dalam melakukan kewajibannya, namun pada dasarnya norma yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri terlebih dahulu haruslah seimbang.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa usia Undang-undang Perkawinan yang rentan tua harus diimbangi dengan suatu semangat untuk melakukan upaya pembaharuan terhadap undang-undang tersebut, sehingga memiliki relevansi dengan kondisi sosiokultural di masa sekarang. Alhasil produk yang dihasilkannya pun dapat menjawab berbagai macam problematika baru dalam dunia perkawinan.¹¹

Mengacu kepada penelitian Tahir Mahmood, diidentifikasi minimal tiga belas isu krusial dalam hukum keluarga yang harus mengalami pembaharuan, yakni: batas usia minimal perkawinan, peran wali dalam perkawinan; pencatatan perkawinan, kemampuan ekonomi dalam perkawinan, poligami nafkah keluarga, pembatasan hak cerai, hak hak dan kewajiban suami istri setelah perceraian, kehamilan, dan implikasinya, hak ijbarnya orang tua, pembagian dan jumlah hak waris, wasiat *wajibah* dan wakaf.¹² Di antara isu-isu tersebut, hak dan kewajiban suami istri merupakan fokus perhatian peneliti dalam penelitian ini.

Untuk menyikapi berbagai macam problematika tersebut, penulis akan mereformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan dengan menggunakan pengarusutamaan gender sebagai pisau analisisnya. Adapun tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana tercantum dalam lampiran Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹³ Maksudnya adalah untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap, berpartisipasi dalam, mempunyai kontrol atas, dan memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Sehingga dengan memberlakukan pengarusutamaan gender, dapat diidentifikasi kesenjangan gender yang pada gilirannya menimbulkan permasalahan gender, khususnya terkait dengan konsep hak dan

¹¹ Problematika baru dalam dunia perkawinan tersebut diantaranya, kasus-kasus yang sudah dipaparkan sebelumnya, meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), timpangnya hak dan kewajiban antara suami dan istri, dll.

¹² Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*, Time Press, New Delhi, 1987, hlm 11-12. dalam Siti Musdah Mulia, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, dalam *Islam Negara & Civil Society*, Paramadina Mulya, Jakarta, 2005, hlm 312.

¹³ Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender.

kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dengan demikian, tujuan akhir dari pengarusutamaan gender adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diperoleh fokus penelitian sebagai berikut: (1) Norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2) Reformulasi norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berperspektif Pengarusutamaan Gender (PUG).

B. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini adalah penulis menelaah hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan menggunakan pengarusutamaan gender sebagai pisau analisisnya, sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan analisa datanya yang bersifat deskriptif. Selain pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan historis. Pendekatan ini dilakukan peneliti dalam menelaah dasar pertimbangan disusunnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melalui konsideran ataupun naskah akademik undang-undang ini.

Penelitian hukum normatif tidak mengenal data, sebab dalam penelitian yuridis normatif sumber penelitian diperoleh dari perpustakaan bukan lapangan, sehingga dikenal dengan istilah bahan hukum.¹⁴

Dalam penelitian ini, peneliti mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya sebagai berikut: (a) Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender; (b) Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku-buku, jurnal, dokumen atau literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an karya Nasaruddin Umar, Analisis Jender & Transformasi Sosial karya Mansour Faqih, Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan karya Mufidah Ch, dll; (c) Bahan hukum tersier, diantaranya Ensiklopedi Hak & Kewajiban Keluarga Muslim karya Syaikh Abdul Mun'im Musthafa, Kamus Hukum karya Subekti dan R. Tjitrosoedibio dan Kamus Ilmiah Populer karya Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan cara mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuatu yang diteliti secara jelas dan ringkas. Dalam penelitian ini Hak dan Kewajiban Suami Istri Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih mengalami suatu ketimpangan, bahwa perempuan masih berposisi sebagai pembantu rumah tangga. Analisis deskriptif kualitatif hasil penelitian yang diuraikan dapat disusun secara sistematis, sehingga tampak jelas dan mudah dipahami.

Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah bersifat umum yakni :¹⁵ (a) *Editing* (edit), yaitu seleksi atau pemeriksaan ulang bahan hukum yang telah terkumpul. Bahan hukum yang terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data, untuk menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memeriksa kesalahan, jika terdapat ketidaksesuaian. Pada penelitian ini pemeriksaan ulang (*editing*) dilakukan berdasarkan ragam pengumpulan bahan hukum yang diperoleh tentang hak dan kewajiban suami istri serta pengarusutamaan gender. (b) *Classifying* (klasifikasi), adalah mengklasifikasikan bahan hukum. Hasil kerja awal pada penelitian bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti.

Klasifikasi yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu mengelompokkan atau mengklasifikasikan hasil pengumpulan bahan hukum berdasarkan fokus penelitian yakni hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pengarusutamaan gender. (c) *Analysing* (analisis) adalah analisis hubungan dari beberapa variable yang ditemukan selama penelitian. Hal ini sebagai upaya analisis dengan menghubungkan apa yang ditemukan pada bahan hukum yang diperoleh dengan fokus masalah hak dan kewajiban suami istri serta menggunakan pengarusutamaan gender

C. PEMBAHASAN

1. Terminologi Gender dan Sex

Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia,¹⁶ istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor

¹⁵ Cik Hasan Bisri, **Model Penelitian**, h. 335

¹⁶ Trisakti Handayani, Sugiarti, **Konsep dan Teknik Penelitian Gender**, UMM Press, Malang, 2008, hlm 3. Wacana gender mulai dikembangkan di Indonesia pada era 80 an dan memasuki isu keagamaan di era 90 an, yaitu sejalan dengan masuknya beberapa karya terjemahan berperspektif gender, seperti buku yang ditulis oleh Aminah Wadud Muhsin, Fatima Mernisi, dan Zafrullah Khan. Ketiga buku tersebut tergolong spektakuler dan progresif di kalangan pemikir Islam kontemporer, namun dinilai kontroversial oleh kelompok yang cenderung beraliran fundamentalis. Lihat Mufidah Ch, **Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan**, UIN Press, Malang, 2009, hlm 12.

Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “gender”. Gender dijadikannya sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan.”¹⁷ Gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.

Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris, *gender*, yang mempunyai arti “*grouping of nouns and pronouns into masculine, feminine, and neuter*”, atau kumpulan kata benda dan kata ganti berkaitan dengan maskulin, feminis, dan kata ganti yang bersifat netral.¹⁸ Lips¹⁹ mengartikan gender sebagai “*cultural expectations for women and men*,” atau harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Sedangkan H.T. Wilson²⁰ dalam karyanya *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan sumbangan laki-laki dan perempuan pada kebudayaan dan kehidupan kolektif yang sebagai akibatnya mereka menjadi laki-laki dan perempuan.

Berbeda dengan Lips dan H. T. Wilson, Mansoer Faqih dalam bukunya berjudul *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang di konstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa.²¹

Dalam perspektif al-Qur’ân, kata gender, secara persis tidak didapati dalam al-Qur’ân, namun kata yang dipandang dekat dengan kata gender jika ditinjau dari peran fungsi dan relasinya adalah kata *al-rijâl* dan *al-nisâ’*.²² Namun kata *al-rijâl*

¹⁷ Tim Penyusun, Buku III: **Pengantar Teknik Analisis Gender**, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Jakarta, 1992, hlm 2.

¹⁸ Oxford Learner’s Pocket Dictionary, (UK: Oxford University Press, 2008), h.183.

¹⁹ Hillary M. Lips, *Sex & Gender: An Introduction*, Mayfield Publishing Company, London, 1993, hlm 4.

²⁰ Gender is a basis for defining the different contributions that man and woman make to culture and collective life by dint of which they are as man and women”. Lihat H.T. Wilson, *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, E. J. Brill, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln, 1989, hlm 2. dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Perspektif Al-Qur’an*, Paramadina, Jakarta, 2001, hlm 34.

²¹ Mansour Faqih, Mansour Faqih, *op.cit*, hlm 8.

²² Kata *al rijâl* bentuk jama’ dari kata rajulun diartikan dengan laki-laki, lawan perempuan. Kata *al rijâl* umumnya digunakan untuk laki-laki yang sudah dewasa, dalam bahasa Inggris sama dengan “man”. Kata *al rijâl* mempunyai kriteria tertentu, bukan hanya mengacu pada jenis kelamin, tetapi juga kualifikasi budaya tertentu, terutama sifat kejantanan (*masculinity*). Oleh karena itu tradisi bahasa Arab menyebut perempuan yang memiliki sidat sidat kejantanan seperti rijlah. Kata *al rijâl* jama’ dari *al rijûl* menggambarkan kualitas moral dan budaya seseorang. kata *al rijûl* disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 55 kali. Mempunyai berbagai makna, antara lain berarti gender laki-laki tertentu dengan kapasitas tertentu pula, seperti; pelindung; pemimpin; orang laki-laki maupun orang perempuan. Kata *al nisâ’* adalah bentuk *jamâ’* dari *al mar’ah* berarti perempuan yang telah matang dan dewasa, sepadan dengan kata *al rijâl*. dalam bahasa Inggris disebut dengan woman,

dan *al-nisâ'* ini bukan merupakan satu-satunya istilah yang dipakai dalam al-Qur'ân untuk mengungkapkan makna laki-laki dan perempuan. Di dalam al-Qur'ân ditemukan dua kata untuk makna laki-laki, yaitu *al-rajul* (bentuk singular) dan *al-rijâl* (bentuk plural) atau *al-dzakar* (singular) dan *al-dzukûr* (plural). Sedangkan untuk perempuan, ada kata *al-untsâ*, *al-mar'ah* dan *al-nisâ'*. Al-Qur'ân secara konsisten membedakan penggunaan kedua kata tersebut. Kata *al-dzakar* dan *al-untsâ* digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis, maupun dalam konotasi kultural, yaitu untuk menggambarkan sosok laki-laki dan perempuan yang memiliki kualifikasi budaya tertentu.

Kedua kata *al-dzakar* dan *al-untsâ* dipakai juga untuk hewan, sedang kata *al-rajul/a-rijâl* dan *al-mar'ah/al-imra'ah/al-nisâ'* hanya untuk makhluk manusia. Karena itu, tidak semua *al-dzakar* adalah *al-rajûl*, juga tidak semua *al-untsâ* adalah *al-mar'ah/al-imra'ah*. Dalam ungkapan lain, hanya laki-laki yang memiliki kualifikasi budaya tertentu, misalnya dewasa, berfikir matang, dan mempunyai sifat-sifat kejantanan (*masculinity*) yang dapat disebut *al-rijâl*. Karena itu, perempuan yang memiliki sifat-sifat kejantanan dalam bahasa Arab disebut *al-rujlah*. Demikian pula, hanya perempuan yang memiliki kualifikasi budaya tertentu, seperti sudah dewasa, sudah menikah, yang dapat disebut *al-imra'ah* atau *al-nisâ'*.²³

Dari berbagai definisi gender yang sudah dikemukakan tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya. Gender dalam arti ini mengidentifikasikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis, sehingga hal inipun meminimalisir terjadinya anggapan bahwa dengan identitas seksual yang dimiliki perempuan, membuat perempuan menjadi sosok yang lebih rendah dari laki-laki. Padahal sesungguhnya Allah telah memberikan potensi yang sama pada laki-laki dan perempuan, yang membedakan adalah kesempatan untuk mengembangkan potensi itu.²⁴

2. Pengarusutamaan Gender dalam Perumusan Undang-undang

Pada dasarnya pengarusutamaan gender merupakan proses dimana permasalahan gender diintegrasikan dalam empat fungsi utama institusi

jamaknya women, lawan kata man. Dalam Al-Qur'ân kata *al nisâ'* dengan berbagai pecahannya terulang sebanyak 59 kali. Penggunaan kata *al nisâ'* lebih terbatas dibandingkan dengan kata *al rijâl*. Pada umumnya *nisâ'* digunakan untuk perempuan yang sudah dewasa, berkeluarga, janda bukan perempuan dalam konteks tugas reproduksi perempuan. Dengan demikian *al rajûl* dan *al nisâ'* berkonotasi laki-laki dan perempuan dalam relasi gender. Lihat Nasarudin Umar, *op.cit.*, h. 147-172.

²³ Siti Musdah Mulia, **Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan**, Mizan, Bandung, Januari 2005, hlm. 307-308.

²⁴ Nurjannah Ismail, **Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran**, LKiS, Yogyakarta, 2003, hlm 5.

pemerintah, yaitu perencanaan yang menghasilkan mandat dan tujuan yang jelas untuk perempuan dan laki-laki; pelaksanaan yang memastikan bahwa pelaksanaan strategi menghasilkan pengaruh yang baik kepada perempuan dan laki-laki; pemantauan yang mengukur kemajuan pelaksanaan program dari sudut pandang partisipasi dan manfaat untuk perempuan dan laki-laki; evaluasi yang memastikan bahwa status perempuan dan laki-laki telah meningkat sebagai dampak dari pelaksanaan program tertentu.²⁵

Secara normatif-legalistik pengarusutamaan gender diatur dalam produk hukum Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000, yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, pada tanggal 19 Desember 2000. Dalam pengoperasiannya, Inpres ini dijalankan oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No: 050/1232/SJ yang dikeluarkan tanggal 26 Juni 2001 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Sebagai suatu instrumen hukum, Inpres tidak termasuk ke dalam salah satu tata aturan perundang-undangan yang ditetapkan MPRS No. XX/MPRS/1966. Akan tetapi, Presiden sebagai Kepala Pemerintahan berhak dan berwenang mengeluarkan Inpres kepada para pembantunya sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Sesuai dengan organ hukumnya, Inpres ini menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan, baik pusat ataupun daerah diantaranya, Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, dan Bupati/ Walikota.

Inpres ini menginstruksikan ke berbagai instansi tersebut untuk melakukan lima hal: *pertama*, Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. *Kedua*, memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

Ketiga, Menteri Pemberdayaan Perempuan memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden. *Keempat*, Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

²⁵ Khofifah Indah Parawansa, **Mengukur Paradigma Menembus Tradisi**, LP3ES , Jakarta, 2006, hlm 41.

Sebagai suatu strategi unggulan, pengarusutamaan gender ini merupakan pematangan dari strategi *Gender and Development*.²⁶ Strategi *Gender and Development* ini merupakan respon atas kegagalan *Women in Development* yang dianggap sebagai jawaban atas kritik terhadap pembangunan (*developmentalism*) tetapi dianggap telah gagal menjalankan tugasnya, karena program ini hanya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan.²⁷

Isu dan permasalahan gender perlu diarusutamakan dalam kebijakan dan program karena terkait dengan beberapa hal, antara lain adanya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang masih belum tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah. Disamping program sektoral dipandang terlalu sempit dan tersegmentasi, dan bahkan dipandang belum memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki, serta masih ada bias gender dalam masyarakat dan para pengambil keputusan dan para perencana yang dapat mempengaruhi formulasi kebijakan yang peka akan permasalahan gender.²⁸

Dalam proses penyusunannya sebuah peraturan perundang-undangan haruslah berdasarkan pada beberapa hal²⁹, salah satunya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakan pengganti Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berlaku sejak 2005. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

²⁶ Lahirnya pendekatan *Gender and Development* (GAD) merupakan respon dari kegagalan pelaksanaan strategi *Women in Development* yang memfokuskan gerakannya pada perempuan sebagai realitas biologis. GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. Secara historis, pendekatan GAD muncul pada dekade 1980-an sebagai salah satu implemementasi dari WID. GAD muncul dari teori bahwa sector produksi dan reproduksi merupakan kausalitas penindasan terhadap kaum perempuan. Pandangan bahwa perempuan cenderung diartikan pada peran domestic dan bukan pada sektor publik merupakan ditempatkannya perempuan pada posisi yang subordinat. Secara Implementatif pendekatan GAD cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itulah pelaksanaan GAD memerlukan dukungan sosial budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. GAD tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif. Lihat Trisakti Handayani & Sugiarti, **Konsep dan Teknik Penelitian Gender**, UMM Press, Malang. hlm. 40-42.

²⁷ Mansoer Faqih, *op.cit*, h. 27

²⁸ Khofifah Indah Parawansa, *Ibid*, h. 41.

²⁹ Pasal 18 Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembantuan Peraturan Perundang undangan menyebutkan bahwa "Dalam penyusunan Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, penyusunan daftar Rancangan Undang didasarkan atas: a. perintah Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR; dan h. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan merupakan salah satu langkah yang ditempuh untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Bahwa dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah, diantaranya meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok, dan wilayah/daerah yang masih lemah, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Dibutuhkan suatu kesungguhan untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan, dengan selalu meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perempuan dan laki-laki melalui penghapusan diskriminasi sistemik terhadap perempuan dan laki-laki; mengintegrasikan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebagai hak asasi manusia.³⁰

Kesungguhan sebagaimana yang dimaksudkan diatas adalah adanya kemauan politis (*political will*) dan operasional semua pihak di kalangan legislatif, birokrasi maupun tatanan suprastruktur sekalipun harus direalisasikan. Selain beberapa syarat dan instrument yang dibutuhkan dalam melakukan suatu Pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) tersebut, diperlukan juga dukungan unit kerja dan *focal point* di setiap kementerian serta dukungan peraturan perundang-undangan yang memiliki perspektif gender dan tidak diskriminatif dalam pelaksanaan kebijakan dan program programnya di setiap instansi tersebut.

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Secara mendasar, banyak alasan yang melatar belakangi dibentuknya suatu hukum perkawinan yang memiliki keseragaman secara nasional ini. Diantaranya bahwa keragaman mengenai ketentuan-ketentuan dan hukum perkawinan di Indonesia itu melahirkan kritikan dari berbagai kelompok masyarakat dan sekaligus mengusulkan adanya unifikasi hukum perkawinan agar terciptanya suatu kepastian hukum. Dari umat muslim di Indonesia misalnya, persoalan perkawinan selama ini lebih banyak merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih khususnya dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhsiyah*). Pilihan menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan bukan pekerjaan yang mudah. Kerumitan yang dihadapi masyarakat khususnya hakim dalam menentukan pilihan terhadap pendapat para fuqaha' dari berbagai mazhab, terbuka kemungkinan perbedaan meskipun kasus

³⁰ Khofifah Indah Parawansa, *Ibid* ,h. 41.

yang ditangani sama atau ada kemiripan. Karena itu, pembentukan hukum materiil bagi pengadilan agama merupakan keniscayaan sejarah, ia sangat dibutuhkan masyarakat Islam agar para hakim memiliki pegangan yang seragam, meskipun kemungkinan perbedaan cara tafsir terhadap undang-undang ini masih tetap ada.³¹

Sebagai negara yang didominasi oleh berbagai macam agama dan keyakinan, diperlukan sebuah rancangan Undang-undang Perkawinan yang sangat egaliter dan dapat mengakomodir berbagai macam keanekaragaman tersebut. Berkaitan dengan permasalahan ini di DPR, oleh pemerintah sejak 20 Juni 1966 telah dimasukkan dua Rencana Undang-undang Perkawinan, *pertama*, Rencana Undang-undang Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan yang diberlakukan terhadap semua golongan, dan *kedua*, Rencana Undang-undang Tentang Pokok-pokok Peraturan Pernikahan Umat Islam atau secara umum dipahami bahwa masing-masing golongan terdapat hal yang sama dan yang berlainan, bahkan ada yang berbeda secara diametral (*differentiatie hukum*).³² Beberapa tawaran rancangan ini berangkat atas permasalahan sistem Undang-undang yang akan dianut dalam Undang-undang Perkawinan. Hal tentunya juga mempertanyakan kembali apakah pemerintah akan menganut sistem *differentiasi* atau *unifikasi*.

Jalan keluar terhadap persoalan ini, politik hukum negara menjelaskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa "peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional antara lain dengan mengadakan *pembaharuan, kodifikasi* serta *unifikasi hukum* dalam bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat."³³ Berlandaskan aturan ini, maka secara tidak langsung dalam upaya pembentukan Undang-undang Perkawinan sebagaimana diatas, harus dilakukan dengan mengadakan unifikasi mengingat pengaturan mengenai perkawinan sangatlah beragam. Sebagai suatu bentuk unifikasi hukum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 dan 2 ayat (1)).

Pada dasarnya asas-asas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan sangatlah banyak, namun penulis akan mengemukakan beberapa asas dan prinsip yang dianggap penting saja, diantaranya:

1. Asas Sukaela

³¹ Abdul Halim, **Politik Hukum Islam di Indonesia**, (Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI), hlm .174.

³² Tengku Jafizham, **Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam**, PT. Mestika, Jakarta, 2006, hlm. 97. Lihat juga Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, **Hukum Perkawinan di Indonesia**, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm 9.

³³ Lihat Ketetapan MPR No. IV/ MPR/1973 menyatakan dalam Naskah Bab IV D. ayat b angka 2 dalam (a).

Dalam sejarahnya, banyak perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam tempo dulu dengan cara "paksa". Hal ini tidak bisa dilepaskan dari otoritas seorang wali yang boleh langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin adanya izin dari orang di bawah perwaliannya ataupun dengan kerabat yang berhak menjadi wali bagi perempuan yang hendak menikah. Dalam term agama Islam, wali ini disebut sebagai *wali mujbir*.

Dalam konteks adat di Indonesia, perkawinan yang terjadi atas kehendak orang tua khususnya ayah, bukan berdasarkan atas kerelaan masing masing pria dan wanita akrab disebut pernikahan "Siti Nurbaya". Hal ini agaknya perlu dikaji ulang, mengingat pada dasarnya hukum Islam sangat menjunjung tinggi asas kerelaan bahwa "*arkânul haqiqi lizzawaji huwa ridhat tharfayni*" bahwa unsur haqiqi bagi sebuah perkawinan ialah kerelaan kedua belah pihak.³⁴

2. Asas Legalitas

Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Asas legalitas dalam ketentuan pasal ini tidak hanya dipahami dalam konteks administrasi semata, melainkan memiliki nilai hukum normatif yang bersifat mengikat. Dalam perspektif hukum negara, bahwa pencatatan perkawinan akan turut serta menentukan sah atau tidaknya sebuah akad nikah yang dilangsungkan oleh sepasang laki-laki perempuan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk respon atas problematika praktik perkawinan yang dilakukan dibawah tangan (kawin sirri) atau lebih tepat diistilahkan "kawin liar" yang banyak terjadi di masyarakat.³⁵

Dalam perspektif hukum Islam, pelegal formalan asas legalitas juga sangat ditopang oleh teks wahyu dalam kaitan surat Al Baqarah (2): 283. Pada dasarnya asbabun nuzul diturunkannya ayat ini dalam konteks pencatatan dan pembukuan ekonomi perdagangan yang dilakukan dalam bentuk hutang piutang (*mudayanah*). Hal demikian tidak menutup kemungkinan ayat ini diberlakukan dalam konteks aktivitas administrasi yang lain, termasuk di dalamnya pencatatan nikah. Dalam kaidah hukum Islam menyatakan bahwa "*al 'ibrah bi 'umûmil lafdzi, lâ bi khushushis sabab*" , bahwa yang menjadi patokan sebuah teks adalah

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Dar al Fikr Beirut, jilid 2, hlm. 34.

³⁵ Amin Summa, *op.cit*, h. 172.

didasarkan pada keumuman teksnya itu sendiri, bukan pada spesifikasi penyebabnya.

3. Asas Monogami

Pada dasarnya sistem undang-undang perkawinan Islam di Dunia Islam pada umumnya adalah asas monogami, yakni asas yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.³⁶ Asas ini sebelumnya tidak terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (B.W), namun asas yang berlaku adalah bahwa poligami³⁷ dilarang secara mutlak. Dalam konteks keindonesiaan, hukum perkawinan di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam regulasi ini memberikan kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu, dalam keadaan tertentu, dan dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Di antara syarat-syarat yang dimaksudkan ialah bahwa poligami dilakukan harus atas sepengetahuan istri atau istri-istri yang telah ada, berkemampuan secara ekonomis dan memperoleh izin dari pengadilan yang berwenang.³⁸ Selain itu, secara prosedural, permohonan poligami harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama.

4. Asas perceraian dipersulit

Dalam hadits Rasulullah Saw, menyatakan bahwa talak merupakan perbuatan yang kurang disenangi (dibenci) oleh Allah meskipun halal (boleh) hukumnya. Namun, walau demikian, Allah Swt dalam firmanNya memberikan ruang kepada pasangan suami istri yang tidak dapat mempertahankan rumah tangga untuk berpisah secara baik-baik.³⁹ Secara sepakat semua kalangan Islam sepanjang zaman sepakat untuk tidak menjatuhkan talak semena mena. Selain itu karena talak atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang perceraian menimbulkan dampak

³⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 591.

³⁷ Penggunaan istilah “poligami” untuk mengartikulasikan relasi perkawinan seorang laki-laki dengan beberapa orang istri pada dasarnya tidaklah tepat. Secara terminologi, poligami dalam bahasa latin disebut “*Polygamy*” yang berasal dari bahasa Grik (Yunani) dan merupakan bentukan dari dua kata yaitu “*polus*” dan “*gomes*”. “*Polus*” berarti banyak dan “*gomes*” berarti kawin. Dalam istilah Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan. Harimukti Kridaklaksanaan, dkk, **Kamus Bahasa Indonesia**, edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 77. Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa term poligami pada dasarnya tidak hanya menggambarkan perkawinan seorang laki-laki dengan banyak istri saja, tetapi juga sebaliknya. Sedangkan kata yang paling cocok digunakan untuk maksud seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu adalah poligini. Warkum Sumitro, Anas Kholis, In’am Mushaffa, **Fiqh Poligini Kontemporer**, UB Press, Malang, 2014, hlm. 3.

³⁸ Pasal. UU NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 3 ayat (2), dan pasal 4 ayat (1).

³⁹ Dalam Kalam Allah, menyebutkan: *fa imsâkun bima'rûfin au tasrihun bihsân*, mempertahankan rumah tangga dengan cara yang baik, atau (jikalau terpaksa) melepaskan dengan cara yang baik pula. Al Qur'an surat Al Baqarah (2): 227.

buruk bagi masyarakat luas. Dalam rangka inilah undang-undang perkawinan Islam diundangkan di berbagai Dunia Islam dengan tujuan antara lain mempersulit penjatuhan talak.⁴⁰

Dalam konteks UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga turut serta dalam mengupayakan agar minimnya terjadi angka perceraian. Dalam undang-undang ini, perceraian dapat dilakukan dengan dua model, yakni cerai talak (dijatuhkan oleh suami) dan cerai gugat (dimohonkan oleh istri). Dalam semua model tersebut, perceraian haruslah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut tidak berhasil melakukan upaya perdamaian.⁴¹ Selain itu dalam melakukan upaya perceraian, harus ada alasan-alasan cukup, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁴²

4. Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konteks Keindonesiaan

Dalam konteks Islam, Reformulasi ataupun pembaharuan juga dikenal, namun sebagian orang akan menuduh atau menganggap bahwa perubahan-perubahan seperti ini menyalahi hukum Tuhan. Akan tetapi, KH. Husein Muhammad, dalam memberikan kata pengantar buku berjudul *Fiqh Indonesia*⁴³, mengatakan bahwasannya “kita harus melakukan ijtihad baru atau mereinterpretasi teks-teks fiqh dan sumber-sumbernya melalui pendekatan kontekstual. Pendekatan ini memerlukan beberapa tindakan dan mekanisme tertentu. Paling sederhana adalah mengkaji latar belakang lahirnya formulasi teks fiqh, meneliti rasio legisnya (*idea moral*), memahami konteks sosial, budaya, politik dan analisis linguistiknya.” Beliau juga menambahkan “Para ahli fiqh sepakat bahwa perubahan atas keputusan hukum terjadi karena perubahan konteks sosial dan karena rasio legis atau *idea moral* pada fiqh yang ada sudah tidak relevan lagi. Dari sini, kita kemudian mengkaji secara cermat konteks sosial hari ini di sini, lalu menghubungkan hasil sejumlah analisis kontekstual tadi ke dalam konteks kita hari ini.”⁴⁴

⁴⁰ Amin Summa, *op.cit*, h. 161.

⁴¹ Perhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴² Perhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴³ Hukum Islam Indonesia atau Fiqh Indonesia adalah akumulasi dari persilangan intensif dan dialog interaktif antara pemahaman kontekstual hukum Islam dengan kearifan masyarakat Indonesia beserta seluruh darah daging kebudayaan dalam lanskap kenegaraan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Fiqh Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak masyarakat Muslim Indonesia secara teologis menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan Konstitusinya. Penerimaan secara teologis ini adalah awal dari penyatuan Islam dengan Indonesia, yang kemudian menjadi “Islam Indonesia”. Sebelum terjadi penerimaan secara teologis, Indonesia masih dipandang sebagai pihak lain yang harus dipandang sebagai agama import yang mengancam akan mengubah bangunan kebudayaan Indonesia menjadi Arabisme. KH. Husein Muhammad dalam Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Penerbit Marja, Bandung, 2014, hlm. x1.

⁴⁴ Marzuki Wahid, *op.cit*, h. xxviii.

Kehadiran undang-undang hukum keluarga, khususnya undang-undang perkawinan mengisyaratkan pula wujud pembaharuan hukum Islam di dunia Islam. Berbeda dengan pembaharuan dalam bidang hukum Islam lainnya, seperti bidang politik dan ekonomi, pembaharuan dalam bidang keluarga selalu mengundang reaksi keras dari kalangan tradisional. Hal itu dapat dimaklumi mengingat institusi keluarga dalam hampir semua agama, selalu dipandang sebagai suatu wilayah yang sakral dan karenanya menjadi sangat sensitif. Tidak mengherankan jika berbagai hukum yang digunakan dalam mengatur masyarakat di negara-negara Islam bisa menjadi berubah, namun tidak demikian halnya dengan hukum keluarga.

Dibandingkan dengan pembaharuan Islam dalam beberapa bidang yang lain, pembaharuan hukum Islam dalam bidang keluarga tampak berjalan demikian lambat. Sebab, walaupun pembaharuan hukum Islam mulai terjadi pada abad ke-19, namun hukum keluarga Islam pada kebanyakan negara-negara Islam tetap tidak mengalami perubahan yang berarti.⁴⁵

Diantara perubahan-perubahan yang penting dalam bidang hukum perkawinan adalah pengekangan terhadap perkawinan anak-anak (di bawah umur) dan pembatasan poligami.⁴⁶ Diantara tujuan utama dan pertama dari pembaharuan keluarga Islam khususnya dalam bidang perkawinan yang dilakukan di Dunia Islam pada umumnya memang untuk meningkatkan status atau kedudukan kaum wanita dan memperkuat hak-hak para anggota keluarga inti (*nuclear family*) di atas hak-hak para anggota keluarga yang lebih jauh dalam keluarga yang lebih besar (*extended family*).⁴⁷

Dibandingkan dengan negara-negara Islam tertentu, semisal Maroko, Libya, dan apalagi Sudan, Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di segenap penjuru dunia, tampak terlambat dalam hal kepemilikan Undang-undang Perkawinan (1974), meskipun lebih dulu jika dibandingkan dengan sebagian negara-negara Islam yang lain seperti Malaysia (1983-1987), Aljazair (1984) dan Bangladesh (1980-1984). Keterlambatan Indonesia dalam hal penyusunan undang-undang perkawinan memberikan hikmah tersendiri ke arah penyusunan undang-undang perkawinan yang relatif lebih baik dikarenakan sempat mempelajari sejumlah undang-undang perkawinan yang telah dimiliki oleh negara-negara Islam yang telah lebih dulu memiliki undang-undang perkawinan. Pada saat yang bersamaan, undang-undang perkawinan Indonesia

⁴⁵ Muhammad Amin Summa, **Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam**. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 155.

⁴⁶ John J. Donhue dan John L. Esposito, John J. Donhue dan John L. Esposito, **Islam in Transition, Muslim Perspectives**, (alih bahasa Machnun Husein, **Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah**), CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 365.

⁴⁷ John J. Donhue dan John L. Esposito, *loc.cit*, h. 364-365.

juga memberikan sumbangsih tersendiri bagi penyusunan undang-undang perkawinan dalam menyusun undang-undang perkawinan.⁴⁸

Dalam konteks sekarang, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu mendapatkan perhatian serius, apakah keberlakuan undang-undang ini masih relevan, mengingat kondisi pada waktu undang-undang tersebut dirumuskan jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Berbagai permasalahan perkawinan⁴⁹ yang tidak mampu dijawab oleh Undang-undang perkawinan, adalah sebagai bukti bahwasanya perlu adanya upaya pembaharuan terhadap undang-undang tersebut, mengingat konteks dimana undang-undang ini dirumuskan sangatlah berbeda dengan konteks sekarang.

Dalam proses penyusunannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan banyak didasarkan atas pandangan beberapa ulâma' klasik, diantaranya Ibnu Hazm yang berpendapat bahwasanya memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban sejak terjalinnya akad nikah yang disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.⁵⁰ Pandangan ini memiliki sebuah pemahaman bahwa mencari nafkah adalah otoritas penuh seorang suami, sehingga seorang istri tidak memiliki peluang untuk turut serta membantu suami dalam mencari nafkah, walaupun dengan kondisi perekonomian yang serba kekurangan.

Pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada dalil yang secara eksplisit menyebutkan memasak dan menyuci merupakan kewajiban suami ataupun isteri. Sayyid Sabiq⁵¹ menjelaskan bahwa sebagian fuqaha berpandangan seorang suami tidak boleh menuntut istrinya secara hukum untuk melakukan pekerjaan rumah. Karena akad nikah yang terlaksana antara mereka berdua hanya bermaksud menghalalkan bergaul antara suami istri untuk menjaga kehormatan diri dan menghasilkan keturunan. Pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak termasuk dalam ruang lingkup kewajiban yang harus disediakan suami dalam

⁴⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 157.

⁴⁹ Permasalahan perkawinan yang dimaksud sudah dipaparkan sebelumnya, diantaranya: kasus kawin kontrak yang juga makin marak terjadi dengan resiko perempuan dirugikan. Setelah kontraknya habis, perempuan tidak menikmati hak hak yang sama dengan perempuan yang menikah secara normal. Selain itu dalam kasus poligami yang mendapatkan legitimasi agama. Seringkali menyebabkan keluarga menjadi berantakan. Dan perempuan baik sebagai anak maupun sebagai istri dibuat tak berdaya menghadapi superioritas laki-laki yang dapat menentukan seenaknya berapa jumlah perempuan yang akan dikawini. Ini belum termasuk kasus kasus perkawinan yang tidak tercatat, seperti nikah siri, perkawinan beda agama, dan soal status anak di luar perkawinan. Siti Musdah Mulia, *op.cit*, hlm. 316.

⁵⁰ As Sayyid Sâbiq, *Fiqh as Sunnah* (al Qâhirah: Fath al I'lam al Arâbi, 1410 H/1990 M), III:h. 278.

⁵⁰ As Sayyid Sâbiq, *op.cit*, h. 277.

⁵¹ As Sayyid Sâbiq, *Fiqh as Sunnah*, h. 277.

kehidupan rumah tangga. Pandangan ini diwakili oleh mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali.⁵²

Sebelum lahirnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan inilah yang akrab disebut sebagai fiqh Indonesia. Selama ini pihak yang dianggap paling otoritatif untuk mengambil kesimpulan hukum Islam dari sumber hukumnya, al-Qur'an dan al-Sunnah, sejak dulu hanyalah para ulama' fiqh (fuqahâ).⁵³ Sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual, saatnya kita berani mengatakan madzhab di luar person. Yakni, menyatakan secara tegas dan argumentatif madzhab fiqh yang dinisbatkan pada suatu institusi atau ideologi tertentu yang memang secara nyata terlibat dalam wacana dan penafsiran terhadap sumber Islam dan melahirkan produk hukum Islam (fiqh). Misalnya, penyebutan Fiqh Madzhab Negara (lebih tegas lagi Madzhab Orde Baru), Fiqh Madzhab Kapitalisme, Fiqh Madzhab Sosialisme, Fiqh Madzhab Nahdlatul Ulama, Fiqh Madzhab Muhammadiyah, dan seterusnya.⁵⁴

⁵² Madzhab Hanafi yang mengatakan "Seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, namun istrinya enggan memasak atau mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap." Lihat Imam al-Kasani, *al-Bada'i*, .Dalam Mazhab Syafi'i, "Seorang isteri tidak diwajibkan untuk membuat roti, memasak, mencuci, dan bentuk khidmat lainnya untuk suaminya. Karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban." Lihat Asy-Syairozi, *al-Muhadzdzab*. Dalam Madzhab Maliki mewajibkan atas suami melayani istrinya walau istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat. Selain itu Bila suami tidak pandai memberikan pelayanan, maka wajib baginya untuk menyediakan pembantu buat istrinya. Lihat ad-Dardiri, *Asy-Syarhul Kabir*. Dalam konsep Mazhab Hanbali, bahwa seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Dan pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya. Lihat Imam Ahmad bin Hanbal. Habib Muhsin, *Kewajiban Istri Menurut Islam*, <http://www.ummi-online.com/berita-746-cuci-baju-dan-masak-kewajiban-istri>. diakses tanggal 22 Januari 2015.

⁵³ Mungkin akibat dominannya penafsiran pribadi ulama' itu (*ijtihad fardy*), maka keputusan hukumnya selalu dinisbatkan kepada nama tokoh ulama' itu secara personal. Nyaris tak terdengar fiqh pada masa lalu dinisbatkan kepada suatu institusi atau ideologi tertentu, meski institusi atau ideologi itu juga dominan mempengaruhinya, bahkan secara nyata huruf mewarnai hasil penafsirannya. Marzuki Wahid, *op.cit*, h. 192.

⁵⁴ Penyebutan ini penting dilakukan, setidaknya karena tiga hal: pertama, adalah suatu kenyataan yang tak bisa dibantah bahwa institusi atau ideologi tersebut, termasuk negara, dewasa ini telah menjadi subjek yang mendominasi banyak orang. Nyaris tak seorang pun merdeka atas jaring jaring Idiologi dan aturan institusi negara. Kedua, diakui atau tidak keberadaan institusi atau Idiologi tersebut sekarang ini telah mempribadi (menjadi subyek yang mempengaruhi) melebihi kemampuan pribadi ulama', baik zaman dahulu maupun sekarang. Institusi atau Ideologi tadi bukan saja secara nyata terlibat dalam penafsiran, melainkan juga turut mengarahkan angan angan sosial orang yang berada dalam kungkungannya. Ketiga, dalam kenyataannya rumusan fiqh hasil ijtihad person ulama itu tidak diikuti dalam keseluruhannya oleh umat Islam sekarang. Banyak muslim sekarang mengikuti fiqh secara talfiq (eklektik, campur aduk) sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Dengan kata lain, sebagian pendapat satu ulama ditinggalkan dan mengambil

Bagi umat Islam di Indonesia, persoalan perkawinan selama ini lebih banyak merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih khususnya dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhsiyyah*). Pilihan menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan bukan pekerjaan mudah. Kerumitan yang dihadapi masyarakat dan bagi hakim adalah menentukan pilihan terhadap pendapat para fuqaha' dari berbagai madzhab, terbuka kemungkinan perbedaan meskipun kasus yang ditangani sama atau ada kemiripan. Keragaman dan perbedaan putusan muncul karena karakter fikih adalah keragaman pendapat. Karena itu, pembentukan hukum materiil bagi Pengadilan Agama merupakan keniscayaan sejarah; ia sangat dibutuhkan masyarakat Islam agar para hakim memiliki pegangan yang seragam, meskipun kemungkinan perbedaan cara tafsir terhadap undang-undang masih tetap ada.⁵⁵

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami-isteri memikul tanggung jawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (Pasal 30). Suami-isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31). Baik isteri maupun suami harus saling mencintai dan saling membantu lahir dan batin (Pasal 33). Tugas suami memberi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumah tangga (Pasal 34).

Jikalau dikomparasikan, antara konsep hak dan kewajiban suami isteri dalam fikih klasik dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki banyak kesamaan. Kesamaan tersebut diantaranya, dalam Fiqih Klasik dan Undang-undang Perkawinan, pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masih mendikotomikan antara ruang publik dan ruang privat, yang menurut penulis sudah lagi tidak relevan dengan kondisi bangsa yang mulai berkembang.

Dengan demikian maka status Undang-undang Perkawinan yang banyak disebut sebagai Fiqih Indonesia pada zamannya, perlu untuk dilakukan upaya reformulasi. Hal ini disebabkan undang-undang Perkawinan lebih cocok untuk disebut sebagai fikih timur tengah bukan fikih Indonesia, pasalnya masih memiliki banyak kesamaan dengan fikih klasik khususnya pengaturan berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Seperti halnya, bahwa dalam pasal 31 ayat (3) mengatur bahwa “suami sebagai kepala rumah tangga” dan “isteri sebagai ibu rumah tangga”. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki. Dalam keadaan seperti ini, kiranya sangat mendesak para pengambil kebijakan, baik kultural

pendapat ulama lain untuk sebagian masalah yang lain. Ini berarti banyak orang mengikuti fikih secara lintas madzhab atau membentuk madzhab baru sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Marzuki Wahid, *loc.cit*, h. 192-193.

⁵⁵ Abdul Halim, *op.cit*, hlm. 174.

ataupun struktural, untuk melakukan suatu formulasi ulang terhadap seluruh aturan di atas yang masih sangat diskriminatif.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam narasi ini, formulasi yang terbangun di dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mengklasifikasikan perkawinan sebagai kategori ibadah. Hal ini berbeda menurut Marzuki Wahid dan perumus *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (KHI) lainnya⁵⁶ yang lebih condong menggunakan pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa perkawinan bukan termasuk kategori ibadah (*laysa min bab al-'ibadah*), melainkan masuk dalam kategori *mu'amalah* biasa, yakni suatu kontrak sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁵⁷

Perkawinan menurut CLD-KHI harus dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-tarâdli*), kesetaraan (*al-musawwah*), keadilan (*al-adâlah*), kemaslahatan (*al-maslâhat*), pluralisme (*al-ta'addudiyyah*), dan demokratis (*al-diimuqrathiyyah*).⁵⁸ Melalui berbagai prinsip inilah, tujuan akan terciptanya sebuah keluarga yang bahagia dapat terwujud. Diantara beberapa prinsip tersebut, terdapat prinsip kesetaraan dan keadilan. Menurut Siti Musdah Mulia, bahwa perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak perlu dipersoalkan. Tidak mengapa karena kodratnya, perempuan harus melahirkan, menyusui, mengasuh anak, dan sebagainya. Problem baru muncul tatkala perbedaan jenis kelamin tersebut melahirkan ketidakadilan perlakuan sosial antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, perempuan diposisikan sebagai makhluk yang boleh bekerja dalam dunia domestik dan tidak dalam dunia publik karena dunia publik merupakan area khusus bagi laki-laki. Di sinilah letak pentingnya memisahkan seks dan gender secara proporsional.⁵⁹

Dari sudut pandang gender, relasi antara laki-laki dan perempuan mesti diletakkan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab, ketidakadilan gender di samping bertentangan dengan spirit Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan. Islam dengan sangat tegas telah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Yang membedakan di antara mereka hanyalah kadar ketakwaan saja. Al-Qur'an tidak menekankan

⁵⁶ Diantara perumus CLD-KHI antara lain: Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Abd. Muqsih Ghazali, Anik Farid, Saleh Partanoan Daulay, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrahman Abdullah, Achmad Mubarak, Amirsyah Tambunan dan Asep Taufik Akbar. Lihat Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, h. 229-230.

⁵⁷ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, h. 215.

⁵⁸ Pasal 4 RUU tentang Perkawinan Islam versi CLD-KHI.

⁵⁹ Siti Musdah Mulia, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 319.

superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.⁶⁰ Berlandaskan nalar ini, maka norma hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dikarenakan tidak memberikan kesetaraan kepada suami dan istri dalam ihwal hak dan kewajiban masing-masing. Diantaranya penentuan suami sebagai kepala rumah tangga (pasal 31 ayat 3), suami berkewajiban melindungi keluarganya sesuai dengan kemampuannya (pasal 34 ayat 1) dan istri bertanggung jawab mengurus kehidupan rumah tangga (pasal 34 ayat 2).

Senada dengan prinsip CLD KHI dan pandangan Siti Musdah Mulia di atas, Fazlur Rahman⁶¹ melalui teori *double movement* sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang menjadi pijakan Islam dalam al-Qur'an adalah idea moralnya. Salah satu idea moral yang terdapat dalam undang-undang perkawinan adalah prinsip kesetaraan dan keadilan, sehingga ketika terdapat beberapa pasal yang masih bias gender maka perlu dilakukan suatu formulasi ulang.

Senada pula dengan nalar Abou El Fadl dalam teori otoritarianisme⁶²nya. Kholed Abou El-Fadl mengkritik lembaga fatwa seperti CRLO (*Council for*

⁶⁰ Siti Musdah Mulia, *loc.cit*, hlm. 318-319.

⁶¹ Fazlur Rahman adalah seorang intelektual muslim yang sering melakukan upaya upaya rekonstruksi pemikiran Islam abad ini. Berbagai penelitian yang dilakukan telah menghasilkan ide ide brilian yang segar, meskipun sering kali ide ide tersebut menimbulkan kontroversi yang serius di kalangan pemikir Islam lain khususnya kelompok tradisionalis dan fundamentalis. Ia memang pemikir liberal dan radikal dalam peta pembaharuan Islam, Taufiq Adnan Amal, *Neo Modernism Islam Fazlur Rahman*, h. 13

⁶² Otoritarianisme menurut Abou El Fadl, "adalah tindakan mengunci dan mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks, dalam sebuah penetapan makna, dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagi sesuatu yang pasti, absolut, dan menentukan." Khaled M. Abou El Fadl, **Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif**, terj. R. Cecep Lukman Yasin, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2004, hlm. 19. Ketika menyelami pemikiran Khaled ada suatu kata kunci yang menjadi poin dalam membahas pemikiran-pemikirannya yang lain. Kata kunci tersebut adalah apa yang disebut sebagai otoritatif dan otoriter. Term ini berkaitan dengan otoritas dan otoritarianisme dalam Islam. konsep otoritarianisme yang dibangun Khaled adalah dengan doktrin kedaulatan Tuhan dan Kehendak Tuhan, sedangkan Nabi adalah pemegang otoritas kedua setelah Tuhan. Sebagai pemegang otoritas kedua, Nabi telah meninggalkan tradisinya (Sunnahnya) yang telah terkodifikasi, sehingga pada konteks ini telah terjadi pengalihan 'suara' Nabi pada teks-teks yang tertulis dalam kitab-kitab sunnah. Sekumpulan teks-teks inilah yang dapat ditemukan sekarang dan yang dipandang sebagai wakil dari suara Nabi. Persoalan yang muncul kemudian adalah sejauh mana teks-teks tersebut memiliki otoritas mewakili suara Tuhan dan Nabi? Bagaimana memahami kehendak Tuhan dan Nabi melalui perantara teks-teks tersebut dan bagaimana aturan-aturan supaya dapat mewakili Tuhan dengan tidak menganggap pendapatnya sebagai Kehendak Tuhan?. Dalam menjawab permasalahan tersebut, El Fadl menawarkan tiga hal yang harus diperhatikan, *pertama*, berkaitan dengan kompetensi (*otensitas*), *kedua*, penetapan makna. Bahwa teks tidak dapat berbicara sendiri, melainkan membutuhkan manusia untuk membuatnya dapat berbicara. *Ketiga*, tentang konsep perwakilan (khalifah). Dalam Sugianto, **'Kritik Terhadap Otoritarianisme Agama (Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadel)**, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga 2007, hlm. 49.

Scientific Research and Legal Opinion atau *al-Lajnah ad-Daimah li al-Buhus al-Imiyyah wa-al-Ifta'*) yang merupakan sebuah lembaga resmi di Saudi Arabi yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan yang oleh Abou El-Fadl dianggap terjebak pada sikap otoritarianisme, seperti fatwa pelarangan wanita mengunjungi makam suami, wanita mengeraskan suara dalam berdo'a, wanita menegendarai dan mengemudikan mobil sendiri, dan wanita harus didampingi pria mahramnya. Fatwa-fatwa tersebut dianggap sebagai tindakan merendahkan untuk tidak menyebutkan menindas martabat wanita yang tidak dapat ditoleransi pada zaman sekarang.⁶³

Jikalau teori Abou El Fadl tersebut dikontekstualisasikan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan norma hak dan kewajiban suami istri, maka menurut El Fadl pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri terjebak pada sikap otoritarianisme yang bias gender.⁶⁴ Penempatan posisi suami sebagai kepala rumah tangga seringkali ditafsirkan sebagai sebuah bentuk otoritas suami dalam mengatur segala

⁶³ M.Amin Abdullah, **Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan**, dalam kata pengantar. Khaled Abou El-Fadl, **Atas Nama Tuhan: Dari Fiqih otoriter ke Fiqih Otoritatif**, *op.cit.*, hlm. ix. El Fadl mendefinisikan Fikih sebagai salah satu bentuk ortodoksi (*tadwîn*) ajaran agama yang secara massif terjadi pada abad ke-2 H. Hal itu membuat agama terasa kehilangan elan vital-nya sebagai ajaran yang progressif. Akibatnya, mainstream agama bergeser dari *raison d'être*-nya sebagai *rahmatan lil 'âlamîn* menjadi gerakan sektarian yang membelenggu. Dalam disiplin keilmuan Islam, sebagian kalangan Muslim memandang fikih sebagai produk hukum yang final dan baku tanpa mempertimbangkan aspek epistemologinya. Karena itu, memperlakukan fikih sebagai kehendak mutlak Tuhan merupakan sikap otoriter dan sewenang-wenang.² Padahal, sebagai produk pemikiran, fikih merupakan refleksi sejarah dalam memahami pesan ketuhanan, pun bersifat situasional bergantung kepada konteks sosial yang melatarinya. Dalam Khaled M. Abou El Fadl, **Melawan Tentara Tuhan**, terj. Kurniawan Abdullah, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003, hlm. 17-34.

⁶⁴ Kekhalifahan manusia seringkali menimbulkan sebuah otoritarianisme. Hal ini beresiko akan tunduknya kehendak Tuhan terhadap pemahaman dan kehendak manusia. Untuk itu Abou El Fadl memberikan parameter bagi syarat keberwenangan manusia sebagai wakil Tuhan (pakar hukum). Ada lima syarat yang harus dipenuhi seorang wakil Tuhan, diantaranya: *Pertama*, adalah kejujuran. Wakil Tuhan harus memiliki kejujuran dan dapat dipercaya untuk menerjemahkan perintah Tuhan. Ia harus menghindari kebohongan memahami apa yang sebenarnya tidak diketahui, dan bersikap jujur tentang sejauh mana ilmu dan kemampuannya dalam memahami perintah Tuhan. *Kedua*, ketekunan dalam mengerahkan segenap kemampuan rasionalitasnya untuk menemukan dan memahami kehendak Tuhan. *Ketiga*, komprehensifitas dalam menyelidiki kehendak Tuhan. Seorang penafsir harus melakukan penyelidikan perintah-perintah Tuhan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan hal-hal yang relevan, dan tidak melepas tanggungjawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu. *Keempat*, penggunaan rasionalitas dalam penafsiran dan analisis terhadap perintah-perintah Tuhan. Penafsiran teks harus dilakukan secara rasional, atau setidaknya dengan ukuran yang benar menurut paradigma umum. Artinya, pembaca tidak boleh berlebihan dalam menafsirkan teks sehingga melahirkan kesimpulan bahwa makna teks tersebut benar-benar seperti yang diinginkan pembaca, dan bukan menampilkan maksud yang memang dikehendaki teks. *Kelima*, pengendalian diri atau kerendahan hati dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Pengendalian ini lebih merupakan kewaspadaan tertentu untuk menghindari penyimpangan, atau kemungkinan penyimpangan atas peran pengarang (Tuhan). Dalam Khaled, **Atas Nama Tuhan**, *op.cit.* h. 100-1.

keputusan dan keperluan rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan istri. Hal ini menyebabkan posisi suami sangatlah otonom, sehingga tidak jarang menyebabkan sebuah kesewenang-wenangan terhadap istri, salah satunya kekerasan dalam rumah tangga.

Kegelisahan akademik yang dialami El Fadel pada dasarnya berangkat dari peran teks peraturan perundang-undangan yang seringkali dijadikan legitimasi atas pemikiran seseorang tanpa memperhatikan aspek moral dalam hukum. Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo⁶⁵ mengatakan bahwa selama ini hukum dipandang sebagai suatu skema⁶⁶ atau teks. Sejak itu pula, maka bahasa mengambil peranan utama. Hukum adalah sesuatu yang berbentuk kebahasaan (*talig*, Belanda) atau sebuah *language game*. Tanpa disadari cara berhukum sudah memasuki dimensi baru, yaitu berhukum dengan melalui skema. Panggung hukumpun sudah bergeser dari dunia nyata ke dunia maya yang terdiri dari kalimat dan kata kata. Pergeseran tersebut juga dapat dimaknai sebagai sebuah perkembangan dari sesuatu yang utuh menjadi sesuatu yang direduksi. Setiap kali kita membuat rumusan tertulis, maka setiap kali itu pula kita mereduksi suatu gagasan yang utuh ke dalam tata kalimat. Membuat hukum tertulis adalah tidak sama dengan memindahkan realitas secara sempurna ke dalam teks, sehingga terjadi padanan yang sempurna, melainkan “menerjemahkan kenyataan tersebut dengan kalimat”. Kalimat-kalimat itu mereduksi suatu gagasan yang utuh menjadi skema, kerangka atau *skeleton*.⁶⁷

Teks hukum yang terdapat dalam norma hak dan kewajiban suami istri, agaknya sudah tidak dapat mengakomodir realitas kehidupan rumah tangga saat ini. Kepemimpinan suami sebagai kepala rumah tangga, mulai dipertanyakan, mengingat banyaknya istri yang menanggung beban keluarga, sedangkan suaminya tidak mampu bekerja. Dengan demikian, sebagai suatu bentuk skema atau teks yang tidak lagi relevan dengan zamannya, Undang-undang Perkawinan dituntut untuk direvisi dan disesuaikan dengan konteks sekarang.

Dalam mewujudkan Undang-undang Perkawinan yang mampu mengakomodir semua realitas, perlu adanya berbagai instrumen pendukung, salah satunya adalah progresifitas legislator dalam merumuskan Undang-undang Perkawinan baru tersebut. Progresifitas legislator tersebut adalah sebuah kemampuan dan keberanian yang dimiliki oleh para anggota DPR untuk menjawab setiap tantangan bangsanya. Donald Black mengatakan hukum sebagai suatu variable

⁶⁵ Satjipto Rahardjo adalah salah seorang penggagas hukum progresif.

⁶⁶ Hukum sebagai skema adalah hukum sebagaimana dijumpai dalam teks atau perundang-undangan atau hukum yang dirumuskan dengan sengaja secara rasional. Di sini hukum sudah mengalami pergeseran bentuk, dari hukum yang muncul secara serta merta (*interactional law*) menjadi hukum yang dibuat dan diundangkan (*legislated law*). Satjipto Rahardjo, **Hukum Progresif**, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 7-8.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *loc.cit*, hlm. 7-8.

kuantitatif yang dapat diukur atas dasar frekuensi terjadinya perundang-undangannya, dalam situasi sosial tertentu. Dengan demikian, kuantitas hukum universal menurut masyarakat tempat hukum itu berlaku dan sesuai dengan masa berlaku menurut sejarah.⁶⁸ Dengan menekankan pendapatnya bahwa “*law is governmental social control*”, hukum merupakan pengendalian sosial pemerintah yang mempergunakan legislasi sebagai salah satu instrumennya.

Dari beberapa pemaparan di atas, sebagai konsekuensi dari formulasi perkawinan dengan mentransmisikan prinsip keadilan dan kesetaraan, maka perempuan dan laki-laki diharuskan mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan dan rumah tangga. Karena itu, teks hukum pasal 31 ayat 3 yang memposisikan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dihapus, karena menjadi salah satu penyebab praktik ketidaksetaraan. Kehadiran hukum sebagai skema berjalan seiring dengan semakin kuatnya citra masyarakat sebagai suatu kehidupan yang distrukturkan dan dikonstruksikan. Melihat formulasi baru hak dan kewajiban yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas, secara mendalam akan dipaparkan panjang lebar oleh penulis dalam pembahasan berikutnya.

5. Pengarusutamaan Gender Dalam Reformulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sebagaimana dikemukakan di awal, produk kebijakan negara yang diskriminatif, apapun bentuknya, bertentangan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia, pasal 28 UUD 1945. Hal ini dikarenakan posisi Undang-undang Dasar 1945 merupakan *Ground Fundamental Norm* atau norma yang paling fundamental sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan negara. Jika eksistensi UU Perkawinan masih mengandung banyak diktum hukum yang bias gender, dengan kata lain, diskriminatif, maka ia sejatinya belum sejalan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yang menjadi landasannya. Dalam konteks ini, UU Perkawinan selayaknya diubah, direvisi dan disesuaikan dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan lainnya dan perkembangan kondisi masyarakat Indonesia hari ini.

Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender,⁶⁹ pemerintah diharuskan menyusun atau

⁶⁸ Donal Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, New York, 1976. hlm. 2. Dalam Khudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 86.

⁶⁹ Dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender oleh presiden KH. Abdurrahman Wahid yang diberlakukan untuk seluruh sektor negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah merupakan langkah penting dan luar biasa yang sudah dilakukan negara dalam memenuhi mandat konstitusionalnya.

merevisi suatu kebijakan yang masih bias gender. Dalam konteks pengaturan mengenai hukum keluarga di Indonesia, terlebih mengenai hak dan kewajiban suami istri, pemerintah perlu untuk melakukan suatu upaya pembaharuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan nasional sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan atau program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam aspek-aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan nasional.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang khususnya wilayah domestik, pemerintah perlu merumuskan strategi pengarusutamaan gender dalam regulasi yang berkaitan dengan keluarga di antaranya Undang-undang Perkawinan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam bahasan ini yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah segala aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim, baik di lembaga peradilan agama ataupun pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan.⁷⁰ Dalam konteks kehidupan rumah tangga di Indonesia Undang-undang Perkawinan merupakan salah satu elemen terpenting untuk mentransmisikan dan mentransformasi nilai-nilai kesetaraan serta keadilan gender. Di sisi lain, Undang-undang Perkawinan juga berfungsi ganda sebagai pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam menjalani bahtera rumah tangga, juga sebagai induk yang mengatur hukum perkawinan di Indonesia.

Dalam menjalani bahtera rumah tangga, mengetahui masing-masing hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami istri merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, melalui komponen inilah, suami istri diharapkan mampu untuk memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai sensitivitas kesetaraan dan keadilan gender. Lebih dari itu semua, hak dan kewajiban suami istri yang berkeadilan gender diharapkan tidak hanya meminimalisir tingkat kekerasan dalam rumah tangga tetapi menjadikan pemahaman tersebut sebagai suatu kesadaran praksis dalam kehidupan rumah tangga.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *op.cit*, hlm. 20.

Pembahasan mengenai undang-undang yang mewadahi materi-materi tentang gender dan isu-isu tentang perempuan mendapatkan respon yang beragam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk tahun 2005-2025 yang merupakan salah satu acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah mengupayakan agenda pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional tanpa diskriminasi. Hal ini cukup memberikan angin segar dalam mewadahi segala isu yang berkaitan dengan kesetaraan, diantaranya posisi antara laki-laki dan perempuan yang selama ini sering kali timpang.

Namun dalam kurun waktu tujuh tahun sejak RPJPN diundangkan pada tahun 2007, pengupayaan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang diharapkan memuat isu-isu gender belum begitu terealisasi,⁷¹ sebagaimana akan diungkapkan pada penjelasan berikut ini. Dalam konteks undang-undang perkawinan misalnya, masih terdapat beberapa pasal yang bias gender, seperti pasal yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 3). Selain itu, ada juga pasal yang menyebutkan bahwasanya istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya (pasal 34 ayat 2).

Isu-isu gender belum mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah, baik eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, dan hal tersebut banyak terhalang oleh beberapa hal. *Pertama*, sebagian besar pengambil kebijakan yang masih belum menganggap isu-isu gender sebagai agenda subjek bahasan yang signifikan. *Kedua*, mayoritas pengambil kebijakan masih di dominasi oleh kalangan laki-laki, sehingga produk hukum yang dihasilkannya pun cenderung patriarkhis.

Akhir-akhir ini, isu keadilan gender menjadi kepedulian global yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika proses strategi pembangunan. Secara teori dan praktiknya, sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan selalu terbuka untuk perubahan terutama untuk mengakomodasi dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, termasuk usaha menyisipkan bahasa gender dan perempuan ke dalamnya.⁷² Jika merujuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), bahwa kemungkinan menjadi isu gender sebagai suatu dasar penyusunan kebijakan sangat terbuka lebar. Selain itu pasal 18 huruf e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merekomendasikan agar RPJPN dijadikan sebagai acuan dalam proses penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan.

Berbagai kebijakan baik, yang sudah disusun ataupun belum, diwajibkan untuk mengacu kepada RPJPN tersebut. Jika dari beberapa kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang sudah disusun tersebut bertentangan dengan

⁷¹ Salah satu diantara berbagai bentuk kurangnya optimalisasi RPJPN ini adalah belum terpenuhinya kuota 30% di kursi parlemen.

⁷² Amelia Fauzia dkk, *loc.cit*, hlm. 126.

visi RPJPN maka undang-undang tersebut diharuskan untuk direvisi. Diantara berbagai rencana yang termaktub dalam RPJPN, sangatlah memberikan ruang gerak dalam mewujudkan pembangunan nasional anti diskriminatif terlebih dalam tataran domestik. Hal ini disebabkan seringkali perempuan memiliki akses yang terbatas dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga ataupun masyarakat.⁷³

Gagasan untuk melakukan internalisasi terhadap isu gender dan perempuan ke dalam kehidupan rumah tangga telah mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan, khususnya para akademisi. Namun gagasan tersebut hanya berhenti pada tataran substansi dan wacana, sedangkan tidak dalam wilayah yang lebih aplikatif. Melihat bahwa salah satu fungsi sebuah kebijakan atau peraturan perundang-undangan adalah untuk melakukan perubahan, terutama untuk mengakomodasi dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, maka sangat penting untuk melakukan revisi atau melakukan formulasi ulang terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai suatu usaha untuk melakukan internalisasi nilai-nilai gender ke dalamnya. Dengan cara tersebut, gagasan untuk melakukan internalisasi tidak lagi hanya pada tataran substansi dan wacana belaka.

Dalam melakukan perumusan terhadap Undang-undang Perkawinan yang baru, perlu adanya formulasi ulang terhadap norma hukum yang terdapat dalam undang-undang perkawinan sekarang. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri misalnya, yang diatur dalam VI pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Dari keempat pasal di atas, disebutkan bahwa posisi suami dan istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan bermasyarakat, kemudian ditambah lagi dengan kebebasan keduanya dalam melakukan perbuatan hukum. Dengan hadirnya kedua pasal ini, cukup mengartikan bahwa konsep hak dan kewajiban yang terdapat undang-undang perkawinan sudah mengintegrasikan nilai-nilai gender kedalamnya. Namun hal itu bukanlah merupakan suatu prestasi, dikarenakan perbandingan antara pasal yang bias gender dengan pasal yang mengakomodir nilai-nilai gender sangatlah timpang. Dalam beberapa pasal lain, jumlah pasal yang pengaturannya bias gender cenderung lebih banyak, seperti disebutkan bahwa “suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”(Pasal 31 ayat 3).

Pasal di atas memiliki konsekuensi terhadap keberadaan pasal yang lain, yakni pasal 34 ayat (1) dan (2). Bahasa hukum yang terdapat dalam pasal 31 ayat 3 sangatlah bias gender, yakni “suami adalah kepala rumah tangga”. Bahasa hukum ini berpengaruh terhadap keberadaan pasal 34 ayat (1), bahwa dikarenakan kapasitas suami sebagai kepala rumah tangga maka seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai

⁷³ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

dengan kemampuan suami. Pasal ini agaknya perlu untuk dikaji ulang, bahwa dalam konteks masyarakat kekinian, banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan suaminya tidak mampu untuk bekerja, baik dikarenakan sakit, sudah lanjut usia ataupun tidak mau bekerja.

Realitas tersebut seakan mempertanyakan kembali, apakah posisi sebagai kepala rumah tangga dimiliki oleh laki-laki *an sich* ataukah pihak yang dapat memikul tulang punggung keluarga, tanpa melihat identitas sexnya. Dalam konteks tafsir keagamaan, ayat yang sering digunakan dalam membahas permasalahan ini adalah surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَاتِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka manaatimu, Maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dalam karya fenomenalnya, Asghar Ali Engginer mengusulkan dalam memahami ayat di atas hendaknya dipahami sebagai deskripsi keadaan struktur dan norma sosial masyarakat pada masa itu, dan bukan suatu norma ajaran. Ayat tersebut menjelaskan bahwa saat itu laki-laki adalah manager rumah tangga, dan bukan pernyataan kaum laki-laki harus menguasai dan memimpin. Dalam sejarah Islam keadaan kaum perempuan berubah, seiring makin berkembangnya kesadaran hak kaum perempuan, dan konsep hak juga makin meningkat. Pada saat ayat tersebut diwahyukan memang belum ada kesadaran akan hal itu. Kata *Qawwam* dari masa ke masa dipahami selalu berbeda. Dulu atas dasar ayat tersebut perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki, dan implikasinya adalah seperti zaman feodal bahwa perempuan harus mengabdikan kepada laki-laki sebagai

bagian dari tugasnya. Namun Qur'an menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah sejajar.⁷⁴

Berangkat dari pandangan tersebut, bahwa konsep kepemimpinan dalam rumah tangga tergantung struktur sosial yang ada dalam kondisi masyarakat tertentu. Hal inipun memberikan ruang dan peluang kepada seorang istri untuk menjadi kepala rumah tangga dalam kehidupan domestik, dengan ketentuan bahwasannya segala sesuatu yang seharusnya dikerjakan oleh seorang suami, dilakukan oleh istrinya tersebut.

Selain kalimat "suami adalah kepala rumah tangga" yang masih bias gender, kalimat "istri adalah ibu rumah tangga" memiliki konsekuensi terhadap keberadaan pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan bahwasannya istri berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik baiknya. Pasal ini mengartikan bahwasannya posisi istri dalam rumah tangga hanya *macak, masak dan manak* (3M), sedangkan yang bertugas sebagai pemimpin dan menjadi tulang punggung keluarga adalah laki-laki. Selain itu, dalam hal mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hak dan kewajiban suami istri, menurut hemat penulis perlu digunakan bahasa hukum yang jelas, lugas dan detail.

Pengaturan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 ayat 1 dan 2, berkontribusi besar dalam melakukan pembakuan peran, hal ini mendorong proses pemiskinan perempuan: membuat salah satu pihak (istri) bergantung secara ekonomi terhadap pihak lainnya (suami). Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga, para istri yang menjadi korbannya tidak mudah keluar dari lingkaran kekerasan karena masalah ketergantungan ekonomi. Sementara banyak kasus nafkah di pengadilan, meski diputuskan suami/mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah, tapi keputusan ini tidak berlaku efektif dan dikembalikan pada kemauan dari pihak suami/mantan suami. Selain itu Pengaruh di dunia kerja, nilai pekerja perempuan lebih rendah karena dianggap sebagai bukan pencari nafkah utama. Para istri yang bekerja sering disamakan dengan lajang, sehingga tidak mendapat tunjangan keluarga seperti yang diperoleh oleh rekannya laki-laki.⁷⁵

Menurut Scanzoni sebagaimana yang dikutip oleh Evelyn Suleeman bahwa hubungan suami istri dibedakan menurut pola perkawinannya. Terdapat 4 macam pola perkawinan, yaitu *owner property*⁷⁶, *head complement*⁷⁷, *senior junior*

⁷⁴ Asghar Ali Engginer, **Pembebasan Perempuan**. h.

⁷⁵ YLBH APIK Jakarta, Usulan Amandemen Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Berikut Argumentasi-Argumentasinya.

⁷⁶ Pola perkawinan *owner property*, istri adalah milik suami sebagaimana bentuk *property* lainnya. Tugas suami adalah mencari nafkah, tugas istri adalah menyediakan makanan untuk suami dan anak-anak, dan tugas kerumahtanggaan. Pola relasi yang dibangun bersifat hirarkhis, suami memiliki kekuasaan mutlak atas istri termasuk kontrol sosial maupun seksualnya. Dari sudut pandang teori pertukaran, pola relasi ini menempatkan suami sebagai penyedia nafkah istri,

*partner*⁷⁸, dan *equal partner*.⁷⁹ Dari berbagai jenis pola perkawinan tersebut, relasi perkawinan yang termaktub dalam beberapa pasal hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana sudah dijelaskan di atas, lebih cenderung masuk dalam kategori pola perkawinan *owner property*. Pasalnya, relasi suami istri dalam pasal 31 ayat 3, 34 ayat 1 dan 2 bersifat patriarkhis, bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak atas istrinya termasuk kontrol sosial maupun seksualnya. Dalam bahasa lain, pola relasi ini menempatkan suami sebagai penyedia nafkah istri, sedangkan istri berkewajiban melayani suami. Dalam pola perkawinan *owner property* yang terkandung dalam beberapa pasal tersebut, kekerasan dalam rumah tangga merupakan aktivitas yang seringkali terjadi.⁸⁰ Pasalnya posisi suami sangatlah

sedangkan istri berkewajiban melayani suami meski tidak dikehendaki agar istri mendapatkan pengakuan dari lingkungannya sebagai istri yang baik. Suami memiliki power full dalam menentukan perjalanan rumah tangganya, kehidupan pribadi istri di bawah kontrol suami, perintah suami wajib ditaati. Suami memegang peran otonom pengambil keputusan termasuk menceraikan istri dengan alasan tidak dapat melayani suami. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami merupakan aktivitas yang wajar terjadi. Dalam perspektif gender posisi asimetris ini disebut dengan subordinasi di mana mendominasi istri yang berdampak pada relasi timpang gender. Lihat Mufidah CH, **Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender**, *op.cit*, hlm. 159-160.

⁷⁷ Perkawinan *Head Complement*, menempatkan istri sebagai pelengkap kehidupan suami. Suami istri membagi tugas bersama dalam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan kasih sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi, pengertian, komunikasi terbuka dan pencari nafkah sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga yang diperlukan keluarga. Secara substantive istri juga sebagai pendamping suami yang memberikan support pekerjaan untuk kemajuan karir suami. Peran suami dalam keluarga juga terbuka, misalnya membantu istri dalam tugas kerumahtanggaan jika diperlukan. Norma yang berlaku pada perkawinan ini mirip dengan perkawinan *owner property*. Istri memiliki hak bertanya dan memberikan usulan tetapi keputusan tetap di tangan suami. Posisi istri menjadi atribut sosial suami istri dan mencerminkan martabat suami dalam berperilaku maupun penampilan fisik. Kedudukan istri dalam komunitasnya sangat tergantung pada kedudukan suami. Lihat Mufidah CH, **Psikologi Keluarga Islam Perspektif Gender**, *op.cit*, hlm. 160.

⁷⁸ Pola perkawinan *Senior Junior Partner*. Posisi istri masih menjadi bagian atau pelengkap suami namun sudah menjadi teman. Istri yang bekerja masih dianggap sebagai pencari nafkah tambahan disamping suami pencari nafkah utama. Istri memiliki kekuasaan dalam mengatur penghasilannya dan pengambilan keputusan namun suami tetap memiliki kekuasaan lebih besar dari istri. Lihat Mufidah CH, **Psikologi Keluarga Islam Perspektif Gender**, *loc.cit*, hlm. 160-161.

⁷⁹ Evelyn Suleeman, **Hubungan hubungan dalam keluarga**, dalam T.O. Ihromi (ed) **bunga rampai Sosiologi Keluarga**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 100-101. Lihat juga Mufidah CH, **Psikologi Keluarga Islam berwawasan Gender**, *loc.cit*, hlm. 159-160.

⁸⁰ Data Kasus KDRT di Indonesia mulai tahun 2007 hingga 2014 mengalami peningkatan. Tahun 2007 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merealise bahwa tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan pada tahun ini adalah 17.772 KDRT. Data diambil dari Komnas Perempuan tahun 2008. Pada tahun 2011 kasus KDRT meningkat drastis menjadi 113.878 (311 kasus KDRT perhari). <http://www.antaraneews.com/diakses> pada tanggal 24 Februari 2015. Pada tahun 2013 jumlah KDRT kisaran 919 (25% dilakukan oleh suami terhadap istri). <http://jakarta.okezone.com/>. Sedangkan pada tahun 2014, Lembaga Advokasi Perempuan Damar Lampung merealise telah terjadi peningkatan KDRT pada tahun ini sebesar 1.025.

otonom, ataupun memiliki power full dalam pengambilan keputusan semua hal yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga.

Sebagai suatu regulasi induk yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, pola relasi yang terkandung di dalam Undang-undang Perkawinan haruslah ideal. Ideal dalam terminologi ini bahwasanya antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara baik diranah publik ataupun domestik, tanpa adanya pihak yang lebih otonom dalam mengambil keputusan. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan agar relasi yang terkonstruksi dalam undang-undang perkawinan tersebut tidak timpang dan meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Melihat berbagai pola perkawinan yang ditawarkan oleh Scanzoni di atas, *equal partner*, sangatlah ideal untuk dijadikan pola baru dalam mewujudkan undang-undang perkawinan yang berwawasan gender. Pasalnya relasi suami dan istri dalam pola perkawinan jenis ini menempatkan posisi suami istri dalam suatu kesetaraan.

Senada dengan konsep *equal partner* yang ditawarkan oleh Scanzoni, dalam perspektif Islam relasi suami istri yang ideal adalah yang berdasarkan pada prinsip “*mu’asarah bi al ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik). Dalam surat al Nisa’: 19 ditegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيجعلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

“Dan bergaulah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik (patut), kemudian jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah), karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Al Nisa’: 19)

Ayat ini memberikan pengertian bahwa Allah menghendaki dalam sebuah perkawinan harus dibangun relasi suami istri dalam pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati dan kewajiban keduanya. Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* akan terwujud jika keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam pergaulan sehari-hari. Untuk itu diperlukan individu-individu sebagai anggota keluarga yang baik dalam keluarga yang baik sebagai subjek pengelola kehidupan keluarga menuju keluarga ideal.⁸¹

Dari kedua perspektif di atas, pada prinsipnya hubungan suami istri harus dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, saling percaya, saling tolong menolong dalam suka dan duka. Seluruh urusan dalam rumah tangga berlandaskan saling ridha dan musyawarah. Masing-masing pihak ikhlas menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya. Mereka harus saling

⁸¹ Mufidah CH, **Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender**, *ibid*, h. 161.

menasihati, saling membantu untuk menunaikan tanggung jawab kehidupan suami istri serta pemeliharaan anak-anak dan pendidikan mereka dalam setiap situasi dan kondisi. Rumah tangga tidak akan harmonis jika hubungan yang dibangun atas penuntutan hak, bersifat hitam putih, kaku dan saklek.

Melihat dari berbagai pemaparan di atas, tuntutan untuk melakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan semakin kuat, khususnya berkaitan dengan norma hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Pasalnya semangat yang terdapat dalam undang-undang perkawinan kurang mengakomodir partisipasi perempuan dalam proses pembangunan nasional.

Melihat bahasa hukum yang terdapat pasal 31 ayat 3 tersebut seringkali menuai polemik dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam kehidupan rumah tangga., maka selayaknya pasal tersebut dihapus. Pada dasarnya keberadaan pasal 31 ayat 3 merupakan wujud inkonsistensi dalam undang-undang perkawinan. Pasalnya secara jelas dinyatakan bahwa pasal 31 ayat 1 memposisikan kedudukan antara suami dan istri adalah seimbang. Untuk itu jikalau demikian keberadaan pasal 31 ayat 3 seharusnya dihapus dengan beberapa alasan. *Pertama*, pasal 31 ayat 3 yang menyebutkan bahwasanya suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 yang menegaskan kedudukan suami dan istri adalah seimbang. *Kedua*, semangat yang terdapat dalam pasal 31 ayat 3 tidak sesuai dengan konteks sekarang, yang memberikan peluang sebesar besarnya kepada perempuan untuk turut serta dalam berpartisipasi mewujudkan pembangunan nasional, sebagaimana yang sudah tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Ketiga, keberadaan pasal ini menjadi sebab marak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang diakibatkan salah satu pihak memiliki posisi yang otonom ataupun power full dalam rumah tangga. Kepemimpinan dalam rumah tangga mengikuti struktur sosial yang terdapat dalam suatu masyarakat, mengingat *'illat* atau sebab hukum kepemimpinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Al Nisa' ayat 34 adalah pihak yang dilebihkan kemampuannya untuk melindungi dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya tanpa harus melihat identitas biologisnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dalam keluarga. Karena bagaimanapun juga keluarga merupakan struktur terkecil dalam masyarakat, sehingga membutuhkan hirarkhi. Namun, walaupun demikian hirarkhi ini tidak perlu diatur dalam undang-undang, melainkan mengikuti konstruksi sosial masyarakat tertentu.

Sebagai konsekuensi logisnya, ketika keberadaan pasal 31 ayat 3 dihapuskan, maka keberadaan pasal yang berkaitan dengan pasal tersebut, diantaranya pasal 34 ayat 1 dan 2, ataupun hak dan kewajiban suami istri di luar pasal 30 sampai 34 yang diatur secara khusus, perlu juga untuk direvisi. Sebagaimana yang termaktub

dalam pasal 34 ayat 1 bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dikarenakan kesetaraan posisi suami dan istri, maka kewajiban untuk melindungi sesama ataupun memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga ditanggung bersama oleh keduanya. Hal itu dilakukan oleh suami istri atas kemampuannya masing-masing.

Kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 34 ayat, pada dasarnya juga harus direvisi. Hal tersebut menjadi penting, dikarenakan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya bukan tugas istri *an sich*, melainkan merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Alasan yang seringkali dijadikan legitimasi untuk menempatkan tugas istri sebagai pengatur urusan rumah tangga adalah berkaitan dengan identitas biologis (seks) istri sebagai perempuan. Secara fisiologis dikarenakan identitas biologisnya, menyebabkan perempuan tidak dapat melakukan pekerjaan yang berat. Hal ini terkesan sangat riskan, bahwa urusan rumah tangga sangat begitu kompleks, mulai menata taman, membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian dll. Dan anehnya, berbagai pekerjaan berat tersebut, ditetapkan oleh pasal 34 ayat 1 sebagai kewajiban istri.

Melihat permasalahan tersebut, maka sejatinya pasal 34 ayat 2 dilakukan pembaharuan menjadi, “Suami dan Istri, secara bersama-sama wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.” Redaksi pasal ini mengartikan bahwa, dikarenakan urusan rumah tangga yang begitu kompleks dan berat, maka butuh kerjasama antara suami dan istri dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Dalam hal penyelesaian sengketa berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, banyak kasus nafkah di pengadilan, meski diputuskan suami/mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah, tapi keputusan ini tidak berlaku efektif dan dikembalikan pada kemauan dari pihak suami/mantan suami. Untuk itu, melihat problem tersebut, penulis menawarkan perubahan redaksi dalam pasal 34 ayat 3 menjadi, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya untuk saling melindungi dan saling berbagi peran dan kerja kerumah tanggaan, atau salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Demikian, dengan mengarusutamakan konsep gender dalam perumusan Undang-undang Perkawinan yang baru, akan berdampak signifikan terhadap berbagai aspek, baik dalam upaya untuk meminimalisir presentase jumlah kekerasan dalam rumah tangga, berkurangnya tingkat kesenjangan sosial, mengurangi angka kemiskinan ataupun dapat memberikan ruang seluas luasnya kepada perempuan agar dapat berpartisipasi dalam ranah publik ataupun domestik, terlebih dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan gender. Dalam mewujudkan cita-cita besar

ini, tidak hanya diperlukan komitmen politik (*political will*) dari pemerintah, baik lembaga lembaga eksekutif, yudikatif, ataupun legislatif, namun juga dibutuhkan dukungan serta partisipasi dari semua elemen yang ada, diantaranya, civitas akademika, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan semua elemen yang terkait untuk mensupport upaya pembaharuan ini.

Tidak lolosnya *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD) KHI yang pernah digagas oleh Siti Musdah Mulia, Marzuki Wahid, Abdul Muqsih Ghazali, Anik Farida, Saleh Partaonan, Ahmad Suaedy, Marzani Anwar, Abdurrahman Abdullah, Ahmad Mubarak, Amirsyah Tambunan dan Asep T. Akbar, merupakan indikator penting akan lemahnya dukungan dan sinergitas baik masyarakat, civitas akademika ataupun pemerintah dalam rangka mendukung program ini. Hal ini sangat berefek signifikan, pasalnya dukungan dari semua elemen tersebut sangatlah penting, karena tanpa dukungan tersebut, gagasan ini hanya bagaikan angin yang berlalu.

Gagasan ini dapat dimulai dengan adanya bentuk penyadaran dan pendidikan publik terhadap masyarakat akan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga yang berwawasan gender. Alhasil jikalau beberapa hal tersebut dapat terpenuhi, maka impian terwujudnya suatu pembangunan nasional yang berbasis kesetaraan dan keadilan akan segera terwujud.

Terlepas dari beberapa pemaparan di atas, dalam aras yang lain Ratna Megawangi menawarkan sebuah relasi gender yang berbeda dengan relasi gender pada umumnya. Menurutnya selama ini seringkali struktur hirarkhi dijadikan kambing hitam oleh para feminis atas segala persoalan yang terjadi terhadap perempuan. Kesimpulan ini Menurut Ratna Megawangi agaknya cukup timpang, dikarenakan kesetaraan yang seringkali dipahami oleh para aktivis gender yang mainstream selama ini selalu berangkat dari data-data kuantitatif. Hal demikian menyebabkan kesetaraan yang terwujudkan adalah kesetaraan kuantitatif, yakni suatu kesetaraan 50/50.⁸² Dalam pandangan Ratna Megawangi, kesatuan harmonis antara suami istri dapat diwujudkan dalam kehidupan struktur hirarkhi, yang mana masing-masing suami istri memiliki tugas yang berbeda beda namun setara (*unity in diversity*).⁸³ Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya terfokus terhadap kajian gender pada umumnya, sehingga relasi gender yang ditawarkan oleh Ratna Megawangi di atas akan menjadi bahan penelitian oleh peneliti dalam kesempatan yang akan datang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

⁸² Ratna Megawangi, **Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender**, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 26.

⁸³ Ratna Megawangi, *op.cit*, hlm. 229.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana penyusun uraikan di atas, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami-isteri memikul tanggung jawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (Pasal 30). Suami-isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami sebagai kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (Pasal 31). Baik isteri maupun suami harus saling mencintai dan saling membantu lahir dan batin (Pasal 33). Tugas suami memberi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumah tangga (Pasal 34). Dari kelima pasal tersebut mengandung beberapa pasal yang sudah mentransmisikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan ke dalamnya. Namun sebagian besar dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri masih terdapat banyak pasal yang menurut penulis bias gender, diantaranya, pasal 31 ayat 3, pasal 34 ayat 1 dan pasal 34 ayat 2.
2. Hak dan Kewajiban suami-isteri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih bersifat bias gender. Bias gender dalam Undang-undang Perkawinan disebabkan dari dua faktor, *pertama*, salah satu kontruksi yang digunakan dalam penyusunan Undang-undang ini adalah *fiqih klasik*, yang secara kontekstual sudah lagi tidak relevan kondisi saat ini. *Kedua*, latar belakang sosiokultural para legislator yang memprakarsai penyusunan dan perancangan Undang-undang ini cenderung patriarkhis. *Ketiga*, dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri, terjadi inkonsistensi antara beberapa pasal tersebut, diantaranya pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya posisi suami dan istri seimbang Hal ini berbeda dengan yang tertera dalam pasal 31 ayat 3, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga.

Melihat beberapa kelemahan ini, menjadi sebuah keharusan dalam melakukan reformulasi terhadap norma hak dan kewajiban suami istri yang masih bias gender. Dalam perpektif pengarusutamaan gender, mengharuskan semua produk kebijakan baik dalam wilayah pusat ataupun daerah untuk mentransmisikan nilai kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan kedalamnya. Perspektif ini, mengharuskan pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-undang Perkawinan secara setara tanpa mempersoalkan identitas biologis (sex).

Kepemimpinan suami dalam rumah tangga, membuat posisi suami menjadi otonom, atau menjadi pihak yang paling otoritatif dalam menentukan keputusan dalam rumah tangga. Hal ini tidak jarang membuat suami melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap

istrinya, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Menurut penulis, kepemimpinan dalam rumah tangga dapat terbantahkan oleh berbagai realitas yang membuktikan bahwasanya seorang istri pun dapat menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan suaminya tidak mampu untuk bekerja. Hal inipun agaknya timpang, sehingga menurut penulis pengaturan kepemimpinan dalam rumah tangga ini untuk dihapus. Namun, walau demikian, kepemimpinan dalam rumah tangga disesuaikan dengan kondisi sosio kultural dalam wilayahnya masing-masing. Hal ini menjadi penting, karena penulis menyadari, bahwa institusi keluarga sebagai bagian terkecil suatu masyarakat diharuskan mempunyai struktur.

Sebagai konsekuensi dihapuskannya pasal ini dalam Undang-undang Perkawinan, maka keberadaan pasal 34 ayat 1 dan 2 menjadi patut untuk diperbaharui. Redaksi dalam pasal 34 ayat 1 berganti menjadi, “Suami dan istri wajib untuk melindungi sesamanya dan secara bersama-sama memberikan segala sesuatu kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya masing-masing.” Sedangkan dalam pasal 34 ayat 2 diperbaharui menjadi, “Suami dan istri secara bersama-sama berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan dilakukannya pembaharuan terhadap beberapa pasal diatas, maka mempunyai konsekuensi terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi antara suami dan istri terkait dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam pasal 34 ayat 3, penulis menawarkan redaksi baru berbunyi, “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya untuk saling melindungi dan saling berbagi peran dan kerja kerumah tanggaan, atau salah satu pihak merasa diperlakukan tidak adil, maka ia berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

2. Rekomendasi

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal yang bermanfaat bagi penulis khususnya dan civitas akademika Universitas Brawijaya Malang dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta masyarakat pada umumnya. Adapun beberapa hal yang direkomendasikan penulis, diantaranya:

1. Bahwa dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus untuk selalu melakukan pembaharuan terhadap aturan-aturan yang ada, terlebih berkaitan dengan hukum perkawinan Islam. Pasalnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah kurang mampu untuk menjawab berbagai banyak permasalahan yang akhir-akhir ini muncul, sehingga menuntut para legislator untuk melakukan pembaharuan

terhadap undang-undang tersebut, baik aturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri ataupun berbagai aturan yang lain.

2. Selanjutnya bagi kalangan akademisi, tokoh-tokoh masyarakat dan elemen-elemen lain ikut berperan penting dalam membangun sinergitas terhadap legislator guna menghasilkan suatu produk hukum perkawinan yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Selain itu, penulis merekomendasikan agar peneliti berikutnya dalam menjadikan relasi gender sebagai suatu pisau analisis, dapat menggunakan relasi gender dari sudut pandang lain.

Daftar Pustaka

Amirudin & Asikin, Zainal, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta:, Cet. III, 2006.

Amak FZ. **Proses Undang-undang Perkawinan**, Al Ma'arif, Bandung, 1976.

Aritonang, Handra, **Pendidikan Hukum Bagi Wanita Sebagai Upaya Pemberdayaan Wanita dalam Perwujudan Hak Asasi Manusia**. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, Alumni, Bandung, 2000.

Arikunto, Suharsimi, **Prosedur Penelitian,: Suatu Pendekatan Praktek**, Rieneka Cipta, Jakarta, 2002.

Bertens, K, **Etika**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

Black, Donal, **The Behavior of Law**, Academic Press, New York, 1976.

Dimiyati, Khudzaifah, **Teorisasi Hukum**, Genta Pulishing, Yogyakarta, 2010.

Donhue, John J. dan Esposito, John L., **Islam in Transition, Muslim Perspectives**, (alih bahasa Machnun Husein, **Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah**), CV Rajawali Jakarta, 1984.

Dzhayatin, Siti Rukhaini, dkk. **Kesetaraan antara Perempuan dan Laki-laki di Dalam Reformulasi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam**. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. Ke 1.

Echols, John M. dan Shadily, Hassan, **Kamus Inggris Indonesia**, Gramedia, Jakarta, cet XII, 1983.

El Fadl, Khaled M. Abou, **Melawan Tentara Tuhan**, terj. Kurniawan Abdullah, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2003.

- El Fadl, Khaled M. Abou, **Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif**, terj. R. Cecep Lukman Yasin, PT. Serambi Ilmu Semesta Jakarta, 2004.
- Engginer, Asghar Ali, **Pembebasan Perempuan**, LKiS, Yogyakarta, Cet II, 2007.
- Fakih, Mansour, **Analisis Gender & Transformasi Sosial**, Pustaka Pelajar Yogyakarta, cet ke 12, 2008. .
- Griffin, Agnes Estiko & Griffin, P. Bion, *Women in The Hunter: The Agta* dalam Caroline B. Brettel and Carolyn F. Sargent, *Gender in Cross-Cultural Perspective*, Practical Hall, New Jersey, 1933.
- Hadikusma, Hilman, **Hukum Perkawinan Indonesia**, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Halimah, Syeikh Abdul Mun'im Musthafa, **Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Suami dan Istri** Diterjemahkan oleh Ibnu Muslih, Inasmedia, Klaten, 2008.
- Halim, Abdul, **Politik Hukum Islam di Indonesia**, Badan Litbang & Diklat Departemen Agama RI, Jakarta, 2008.
- Handayani, Trisakti, Sugiarti, **Konsep dan Teknik Penelitian Gender**, UMM Press, Malang, Cet. VIII, 2008.
- Irianto, Sulistyowati, **Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan**. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, Alumni Bandung, 2000.
- Ismail, Nurjannah, **Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran**, LKiS, Yogyakarta, 2003.
- Istiadah, **Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam**, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999.
- Jafizham, Tengku, **Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam**, PT. Mestika, Jakarta, 2006.
- Kessler, Suzanne J & McKenna, Wendy, **Gender: An Ethnomethodological Approach**, John Wiley & Sons, New York, dll, 1977.
- Lamphere, Louise, **The Domestic Sphere of Women and the Public World of Man: The Strength and Limitations of an Anthropological Dictionary**, dalam Brettel & Sargent.

- Linda R. Maxon & Charles H. Dougherty, **Genetic a Human Perspective**, W. M. C. Brown Publisher, Iowa, 1985.
- Lips, Hillary M, **Sex & Gender: An Introduction**, Mayfield Publishing Company London, 1993.
- Mahfud, MD, **Politik Hukum di Indonesia**, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Martin, M. Key and Voorhies, Barbara, *Female of the Species*, Columbia University, New York, 1975.
- Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, Cet. 6, 2010.
- Marzuki, Muryati, **Hukum Perkawinan Islam**, Dalam Tapi Omas Ihromi dkk (Eds), **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**, Alumni, Bandung, 2000.
- Megawangi, Ratna, **Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender**, Mizan, Bandung, 1999.
- Mufidah Ch, **Pengarusutamaan Gender pada Basis Keagamaan**, UIN Press, Malang, 2009.
- , **Gender di Pesantren Salaf: Why Not?**, UIN Press, Malang, 2010.
- , **Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender**, UIN Press, Malang, 2013.
- Muhajir, Noeng, **Metode Penelitian Kualitatif**, Rake Surasin Yogyakarta, 1998.
- Muhammad, Abdulkadir, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, **Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender**, Kibar Press cet, ke 1, Yogyakarta, 2006.
- Munti, Ratna Batara, **Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga**, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999.
- Munti, Ratna Batara, **Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga**, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999.
- Mustaqim, Abdul, **Feminisme dalam Perspektif Riffat Hasan**. Dalam Abdul Mustaqim dkk (Eds.). **Studi Al Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi**, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2002.

- Parawangsa, Khalifah Indar, **Mengukir Paradigma Menembus Tradisi; Pemikiran Tentang Keserasian Gender**, LP3ES, Jakarta, 2006.
- Partanto, Pius A. & Al Barry, M. Dahlan, **Kamus Ilmiah Populer**, Arkola, Surabaya, 2001.
- Poespoprodjo, W & Bertens, **Filsafat Moral (Kesusilaan dalam Teori dan Praktek)**, Pustaka Grafika, Bandung, 1999.
- Rahardjo, Satjipto, **Hukum Progresif**, Kompas, Jakarta, 2010.
- Rahman, Budhy Munawar, **Penafsiran Islam Liberal atas Isu-isu Gender dan Feminisme. Dalam Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Rofiq, Ahmad, **Hukum Islam Di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 1998.
- Sâbiq As Sayyid, ***Fiqh as Sunnah***, Fath al I'lam al Arâbi, al Qâhirah., 1410 H/1990 M).
- Sharabi, Hisham, **Neopatriarchy: a Theory of Distorted Change in Arab Society**, Oxford University Press, New York, Oxford, 1988.
- Siti Musdah Mulia, **Muslimah Reformis; Perempuan Pembaru Keagamaan**, Mizan, Bandung, Januari 2005.
- Suyuti, Husin, **Pengantar Metodologi Riset**, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1989.
- Syarifuddin, Amir, **Hukum Perkawinan Islam di Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Sadli, Saparinah, **Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**. Dalam T.O. Ihromi dkk (Eds.). **Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita**. Alumni, Bandung, 2000.
- Sardjono, H.R. **Berbagai-bagai masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974**. Naskah yang tidak pernah dipublikasikan, tetapi menjadi naskah wajib pada Fakultas Hukum Universitas Trisakti (1975-1999).
- Sugianto, **Kritik Terhadap Otoritarianisme Agama (Studi Pemikiran Khaled Abou El-Fadl**, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga, 2007,

- Suleeman, Evelyn, **Hubungan hubungan dalam keluarga**, dalam T.O. Ihromi (ed) **bunga rampai Sosiologi Keluarga**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004.
- Summa, Muhammad Amin, **Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam**, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sumitro, Warkum, Kholis, Anas, Mushaffa, In'am, **Fiqih Poligini Kontemporer**, Brawijaya Press, Malang, 2014.
- Tim Penyusun, Buku III: **Pengantar Teknik Analisis Gender**, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Jakarta, 1992.
- Uqtuv, Akmalia, **Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syeikh Muhammad 'Ali As Sâbûni Dalam *Kitâb Az Zawâj Al Islâmi Al Mubakkir: Sa'adah Wa Hasânah*)**, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Umar, Nasaruddin, **Argumen kesetaraan jender Perspektif *Al-Qur'an***, Paramadina, Jakarta, 2001.
- Wahid, Marzuki, **Fiqih Indonesia**, Penerbit Marja, Bandung, 2014.
- Wilson, H.T , ***Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization***, E. J. Brill, Leiden, New York, Kobenhavn, Koln, 1989.